



VOLUME XIII / NO. 130 / JULI 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

JAGA ASET, OPTIMALKAN MANFAAT

Sebagai salah satu kekayaan negara, BMN perlu dikelola dengan optimal. Perannya bagi penerimaan dan pembiayaan negara menjadi strategis, di samping memenuhi kebutuhan publik akan sarana prasarana. Pelaksanaan revaluasi BMN jadi cara pemerintah mengoptimalkan potensi, agar lebih berdaya ke depan.



Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15** Revaluasi Lejitkan Potensi Aset
- 18** Infografis
- 20** Menilai Hingga Pelosok Negeri
- 23** BMN Award Tingkatkan Motivasi
- 25** Penilaian Kembali Untuk Ketahanan Ekonomi

WAWANCARA

- 27** Kemenkeu Mudahkan Investasi

POTRET KANTOR

- 30** Mendulang Rupiah di Tambang Sumbawa

FIGUR

- 32** Peneliti Yang Bersinergi

EKONOMI TERKINI

- 36** Stabilitas di Atas Pertumbuhan

KOLOM EKONOM

- 40** KB, KITE, dan Kontribusinya bagi Perekonomian Nasional

GENERASI EMAS

- 44** Inovasi Tiada Henti

OPINI

- 46** Perekonomian Nasional di Tahun Politik

REGULASI

- 48** Pemerintah Naikkan Insentif Pajak PMV Menjadi Rp50 miliar

INSPIRASI

- 50** Merengkuh Asa Kaum Pasar

RENUNGAN

- 52** Hobi dan Obsesi

BUKU

- 53** Aroma Karsa

JALAN-JALAN

- 54** Sepat yang “Sepet” Khas Sumbawa

SELEBRITI

- 56** Menapaki Jalan Seni



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



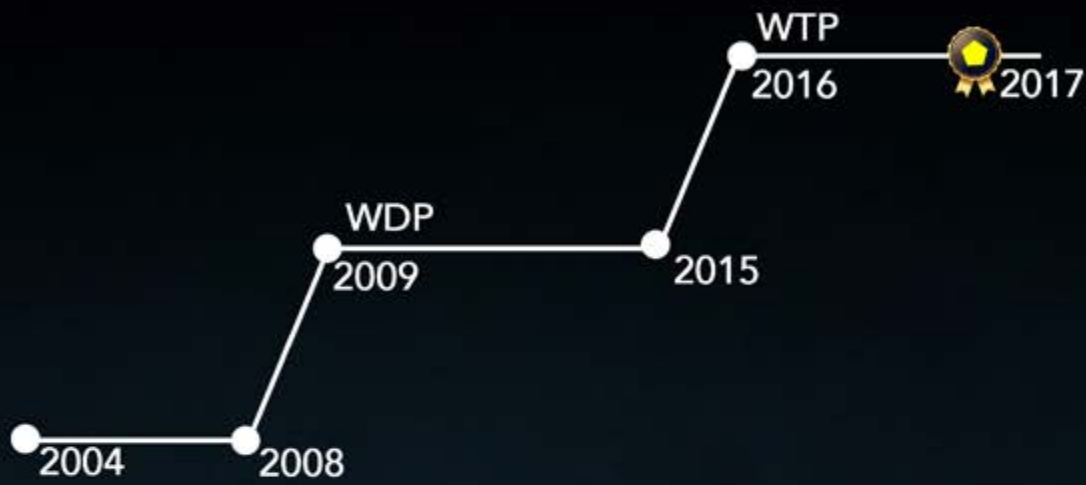
App Store



Google Play

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiانا. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyو, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dipertahankannya opini WTP ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk secara nyata menciptakan transparansi & akuntabilitas, guna meningkatkan manfaat pengelolaan keuangan negara bagi masyarakat Indonesia.



Jaga Aset Negara

Apakah yang terbesit di kepala Anda ketika ada kata ‘aset negara’ disebut? Apakah aset negara sama dengan aset sebuah perusahaan?

Secara regulasi, aset negara adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan bukan kekayaan Pemerintah Daerah.

Barang Milik negara (BMN) adalah salah satu kekayaan negara, perlu dikelola dengan optimal. Pengelolaan aset negara ini dikelola oleh unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Yang dimaksud dengan pengelolaan aset adalah dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan.

Jenis BMN terbagi menjadi tiga. Pertama, Persediaan. Kedua, Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya (seperti hewan, ikan, tanaman, buku perpustakaan). Ketiga, Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, Aset dalam Kerjasama, dan Aset yang tidak digunakan untuk operasional.

Saat ini, DJKN sedang melakukan revaluasi atau penilaian ulang BMN. Berbagai macam aset yang dimiliki negara saat ini seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya dilakukan penilaian agar seluruh aset negara dapat tercatat dengan nilai terkini berdasarkan keadaan sebenarnya.

Tentu ini adalah bukan tugas yang mudah, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan juga lokasinya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas mulia ini nantinya akan dimanfaatkan untuk dicatatkan dalam

laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Dengan catatan terkini pula, pemerintah dapat mengoptimalkan aset negara yang selama ini tidak terpakai dapat digunakan untuk kepentingan publik yang lebih baik.

Pengelolaan aset negara yang optimal adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di saat penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum dapat meningkat, aset negara dapat dijadikan alternatif penerimaan negara. Selain melalui optimalisasi penggunaannya, dapat juga dijadikan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tentu saja pengelolaannya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertanggungjawab. Saat ini, pemerintah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian kedua kalinya dari BPK atas Laporan Keuangan pemerintah Pusat.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Sampaikan masukan #temankeu tentang usaha pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara dengan membalas twit ini disertai tagar #OpiniAnda #MediaKeuangan

@BudzPrasetyo (Budi Prasetyo)

Dari LKPP 2017, masih banyak ditemukan penatausahaan BMN K/L yg kurang tertib. Pemerintah melalui @KemenkeuRI cq. DJKN bisa menginisiasi para kepala K/PK/NL membangun kepedulian pimpinan K/L di

wilayah kerjanya akan peranan aset dalam LKPP. Pemerintah perlu mengkaji payung hukum pengelolaan BMN agar para punggawa DJKN lebih punya taring. Tidak adanya sanksi yg tegas, itu celah K/L apa adanya dalam pengelolaan BMN. Padahal upaya edukasi setiap semester sudah dilakukan terus-menerus.

@InkaWdywt (يتواي دو الشنا)

Dengan adanya revaluasi diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMN yg bersih, transparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat. Karena BMN itu sendiri diperoleh dari APBN, maka pemanfaatan BMN harus semaksimal mungkin.

@ahmadel_amin (Rizaad)

Pengadaan BMN perlu diintegrasikan khususnya antar instansi n lembaga di daerah, agar tidak terjadi pengadaan berlebih yg rawan praktek manipulasi anggaran. Juga perlu dikaji dan ditingkatkan terkait pemanfaatan BMN secara kolektif antar lembaga n instansi pemerintahan, khususnya BMN berupa bangunan n kendaraan, guna menghemat APBD n APBN



Nilai Kembali Aset Negeri

Revaluasi atau penilaian kembali nilai BMN (Barang Milik Negara) merupakan program berskala nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2017 dan ditargetkan selesai tahun 2018 ini. Revaluasi BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan validitas dan keakuratan nilai BMN yang disajikan dalam neraca pemerintah pusat, menjadi *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membangun basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN *idle*.

Foto
Dewanty
Asmaningrum

Desa Pembuat Perahu Pinisi

Pinisi merupakan kapal layar tradisional khas asal Indonesia. Di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Tana Beru Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat desa pesisir yang mayoritas perekonomian penduduknya berprofesi sebagai pembuat perahu pinisi. Pembuatan perahu ini memakan waktu 6-24 bulan, tergantung pada ukuran perahunya. Setelah selesai, perahu dikerek dari bibir pantai menuju ke laut lepas dengan waktu 1 bulan. Perahu pinisi berukuran besar dengan tenaga mesin diesel dapat dijual, harganya mencapai Rp2 miliar.



Foto dan teks
Muhammad Fath



25/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Silaturahmi Menkeu ke Pondok Modern Darussalam Gontor

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersilaturahmi dan berdialog dengan para santri dan pengajar Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Acara bertajuk ‘Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan dan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor’ diselenggarakan pada hari Jumat (25/05). Pada kesempatan tersebut Menkeu menjelaskan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan negara melalui instrumen yang biasa disebut APBN. Menkeu mengatakan dirinya lebih suka meningkatkan penerimaan negara daripada utang. Namun mengingat penerimaan negara masih lebih rendah dari belanja negara (defisit APBN) maka utang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dipilih Pemerintah untuk menambal kekurangan tersebut. “Saat ini kita sudah memiliki instrumen pembiayaan syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti jalan raya, rumah sakit dan kampus. Instrumen itu disebut Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk, saya ingin ada santri-santri dari Gontor yang menjadi ahli keuangan syariah. Sehingga nantinya bisa merancang keuangan negara yang bermanfaat untuk investasi secara syariah untuk membangun Indonesia yang lebih baik”, ujar Menkeu. Selain itu, Menkeu menyatakan bantuan Pemerintah untuk pesantren melalui Kementerian Agama sebesar lebih dari Rp60 triliun dari total Rp444 triliun alokasi dana pendidikan pada APBN tahun 2018. “Kementerian Agama itu lebih dari Rp60

triliun adalah untuk seluruh madrasah di Indonesia dan pesantren,” jelas Menkeu. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan Pemerintah sangat memperhatikan pengembangan pendidikan baik yang berbasis umum maupun agama terutama melalui alokasi APBD. Untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, Pemerintah juga telah mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengelola dana abadi pendidikan. “Dan kita juga mendirikan apa yang disebut LPDP. Itu adalah suatu lembaga untuk pembiayaan dibidang pendidikan. Bahasa Inggris kerennya adalah Sovereign Wealth Fund for Education. Kita itu ingin rakyat Indonesia punya suatu dana abadi untuk pendidikan,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengapresiasi bahwa beberapa santri dari Pondok Pesantren Modern Gontor telah menikmati beasiswa LPDP tersebut. Lebih lanjut, Menkeu berharap akan semakin banyak santri yang bisa mendapat beasiswa tersebut. “Saya senang disini bahwa ada dari Gontor yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya ingin makin banyak santri yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut,” harap Menkeu yang disambut dengan tepuk tangan para hadirin.

23/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers di Istana Negara pada Rabu (23/05). "Pada hari ini, saya telah menandatangani peraturan pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, anggota TNI, dan Polri," kata Presiden. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dengan dikeluarkannya PP untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, tidak hanya dibayarkan gaji pokok namun juga beberapa tunjangan. "Tahun ini adalah bahwa tunjangan hari raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja. Dengan demikian PNS akan mendapatkan THR yang hampir atau sama dengan take home pay mereka 1 bulan," jelas Menkeu.



23/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peringatan 10 Tahun Sukuk Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen dalam APBN sangat penting sebagai sarana ketahanan ekonomi negara mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini disampaikan pada acara “Peringatan 10 Tahun Sukuk Negara: Buka Puasa dan Dialog Bersama Ulama dan Stakeholders Keuangan Syariah” di Aula Juanda, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (23/05). “Pemerintah membangun dan mengembangkan apa yang disebut instrumen syariah, tidak hanya kondisi sumber daya umat Islam di Indonesia adalah sangat besar, tidak hanya dari sisi potensi, tetapi memang riil dari sisi ketahanan negara itu menjadi sangat penting,” tegas Menkeu.

26/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Kunjungi Pasar Telukan Sukoharjo

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau aktivitas para pedagang di Pasar Telukan, Sukoharjo, yang sebagian diantaranya merupakan penerima pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) pada Sabtu pagi (26/05). "Hari ini kita ke pasar, biasanya saya memang kalau di beberapa kota lihat perkembangan Kredit Usaha Mikro, Ultra Mikro (UMi)," tutur Menkeu. Menkeu menjelaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp2,5 triliun untuk Kredit UMi di seluruh Indonesia disalurkan melalui berbagai macam lembaga. "Kalau ini tadi Pegadaian ada yang menggunakan Bahana Artha Ventura, kemudian disalurkan juga bisa melalui koperasi seperti di sini adalah koperasi BUS (Bina Umat Sejahtera), jadi untuk para anggota koperasi tadi mendapatkan bantuan melalui pemerintah yaitu dana APBN yang disalurkan dan mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dibandingkan kalau dia pinjam dari tempat-tempat yang lain," jelas Menkeu.



26/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI



Kuliah Umum Menkeu di IAIN Surakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum tentang peranan APBN dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Sabtu (26/05). Pada kesempatan ini, Menkeu berpesan agar mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi Islam seperti IAIN juga memahami pengelolaan keuangan konvensional sebagai dasar agar bisa mengembangkan keuangan syariah lebih baik lagi. “Saya ingin mengundang Mahasiswa IAIN Surakarta jadilah pakar-pakar keuangan, tidak hanya keuangan syariah. Saya ingin Anda juga tahu keuangan konvensional,” paparnya.

Kuliah Umum Wamenkeu di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus memberikan kuliah umum di Universitas Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur. Pada kuliah umumnya, ia menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai 'Peran APBN dan Generasi Muda dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan'. “Pembangunan harus Indonesia sentris. Seluruh jengkal Indonesia harus dibangun. Bidang pendidikan, kesehatan, agama, budi pekerti harus dikembangkan,” ujarnya di Aula H. Bachir Achmad, Pondok Pesantren Tebuireng, Senin (28/05). Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan bahwa saat ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah antara lain tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ia menyebutkan dengan anggaran yang telah dibelanjakan oleh pemerintah saat ini, hasil yang didapat dirasa belum maksimal.



28/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI

04/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



LKPP 2017 Kembali Raih Opini WTP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden di Istana Negara pada Senin (04/06). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017. "BPK mengapresiasi upaya Pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat konsolidasian," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara. Dikutip dari siaran pers BPK, Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih setelah Pemerintah Pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Untuk tahun 2017, BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (91 persen) yang meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 74 LKKL (84 persen).



05/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Target APBN 2018

Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati angka-angka asumsi makro Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 dalam raker bersama Komisi XI DPR tentang Pengambilan Keputusan Asumsi Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Komisi XI DPR pada Selasa (05/06). Salah satu target estimasi yang mendapat sorotan dari rapat kerja (raker) tersebut adalah range pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,6 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah pada prinsipnya menyepakati usulan dari mayoritas anggota Komisi XI tersebut mengingat tantangan ekonomi global dan dari sisi domestik dalam negeri.

05/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Terima Opini WTP dari BPK

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017 atau Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 (LK BUN). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kedua laporan tersebut pada Selasa (05/06) di Auditorium BPK Jakarta. Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antar pemerintah dengan BPK. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPK atas kerjasama yang luar biasa erat dan baik. Kami konstruktif dalam proses pemeriksaan ini. Proses audit telah semakin baik dan komunikasi di antara kami dengan BPK juga semakin baik,” ujarnya.





Jembatan menjadi salah satu objek revaluasi BMN periode 2017-2018

Foto
Angga
Rindra

REVALUASI LEJITKAN POTENSI ASET

Menilai kembali aset negara menjadi cara pemerintah mengukur dengan pasti nilai kekayaan negara pada sisi aset tetapnya. Melalui revaluasi, aset negara bisa teridentifikasi dengan baik dan diketahui nilai wajarnya. Hal ini penting bagi pengelolaan aset ke depan, sehingga pemanfaatan aset bisa lebih optimal dan mampu melejitkan potensi aset pada kondisi terbaiknya.

Pemerintah tengah gencar melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset negara berupa barang milik negara (BMN). Sejak terakhir direvaluasi pada 2010 lalu, nilai BMN yang tersaji pada neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum menunjukkan nilai terkini. Oleh sebab itu, sejak September 2017, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap sejumlah BMN yang tersebar di ratusan satuan kerja di seluruh Indonesia. Revaluasi kali ini berlangsung selama dua periode hingga 2018.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata menyampaikan, bahwa revaluasi BMN telah mulai dilakukan sejak awal tahun, meski pekerjaan fisiknya dimulai pada September 2017. “Dimulai dengan penyusunan peraturannya, (seperti) Perpresnya, PMK-nya dan sebagainya. Itu sejak awal 2017,” ungkap Isa.

Sementara itu, objek yang direvaluasi merupakan aset tetap yang bernilai besar dan signifikan. Aset

tetap yang secara nilai rendah sekali tidak dijadikan objek revaluasi. “Yang kita revaluasi yaitu adalah *fixed asset* jadi tanah, bangunan, gedung–gedung, jalan, jembatan, dan irigasi,” jelas Isa. Menurutnya, pilihan ini sudah merepresentasikan hampir 80 persen dari total nilai aset yang dikelola Kementerian Keuangan.

Kenaikan signifikan

Berakhirnya masa revaluasi pada tahapan pertama tahun 2017 lalu menunjukkan kenaikan yang berarti. Direktur Penilaian, Meirijal Nur menyampaikan, untuk revaluasi periode 2017, diperkirakan kenaikan nilai aset mencapai 271 persen.

“Diperkirakan terdapat kenaikan dari Rp678 triliun menjadi Rp2.499 triliun,” ungkapny. Jumlah ini sudah termasuk dengan kenaikan jumlah BMN yang sebelumnya tidak tercatat. Dari sebelumnya sebanyak 8.354 item pra-revaluasi, meningkat jumlahnya menjadi 365.242 item pasca revaluasi.

Melengkapi informasi, Direktur Barang Milik Negara (BMN), Encep Sudarwan mengatakan, berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang telah diaudit pada 2017, nilai aset tetap yang tersaji adalah sebesar Rp3.923,4 triliun. Jumlah ini telah memuat koreksi nilai wajar atas hasil revaluasi BMN yang dilaksanakan selama 2017.

Urgensi revaluasi

Direktur Penilaian, Meirijal Nur mengungkapkan, terdapat sedikitnya dua alasan penting mengapa pemerintah melakukan penilaian kembali BMN pada 2017–2018. “Pertama, untuk meningkatkan kualitas neraca keuangan, mengingat kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN dilakukan sepuluh tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Alasan kedua, kegiatan revaluasi merupakan arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, untuk mengetahui kekayaan negara pada nilai terkini. Hal ini juga telah menjadi kesepakatan dengan Komisi XI DPR RI yang meminta Menkeu untuk melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan digunakan kembali sebagai *underlying asset* guna penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dengan kata lain, revaluasi BMN yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan kevalidan dan keakuratan nilai BMN yang tersaji dalam LKPP dan meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset*. Lebih dari itu, pelaksanaan revaluasi ini juga diharapkan dapat membangun *database* BMN yang lebih baik guna kepentingan pengelolaan BMN ke depan, sehingga BMN yang berstatus *idle* atau BMN menganggur dapat teridentifikasi dengan baik.

Keakuratan *database* menjadi hal yang penting. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengupayakan langkah–langkah strategis yang berguna untuk pemanfaatan BMN secara lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan



Dana pembangunan infrastruktur juga berasal dari pemanfaatan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN.

Foto
Anas Nur Huda

efisiensi biaya pemeliharaan atas BMN yang diketahui tidak lagi dapat dimanfaatkan atau layak untuk dihapuskan.

Sejarah penilaian BMN

Menelisik lebih dalam, neraca keuangan pemerintah pertama kali disusun pada 2004. Saat itu, masih banyak BMN yang belum terinventarisasi dengan baik, sehingga aset yang tercatat baru sebanyak Rp299 triliun. Akibat hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat itu menolak untuk memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau *disclaimer* karena auditor tidak bisa meyakini kewajiban dari LKPP tersebut.

Untuk itu, pemerintah melaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP) BMN yang pertama pada 2007 silam. Selanjutnya, dilakukan kegiatan revaluasi BMN pada tahun yang sama. Meirijal mengungkapkan, kedua kegiatan tersebut menjadi salah satu sebab membaiknya opini LKPP, setelah sebelumnya hanya dinyatakan *disclaimer* oleh BPK.

Pemerintah perlu sekitar empat tahun, yaitu 2004–2008, untuk menerima opini *disclaimer* pada LKPP–nya. Namun, setelah nilai wajar aset disajikan dengan lebih baik, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) pada 2009–2015. Hingga terakhir pada LKPP 2016 dan 2017, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) berhasil dikantongi pemerintah.

Tidak hanya itu, peningkatan nilai aset pada revaluasi 2007–2010 menunjukkan hasil yang signifikan. Peningkatan nilai aset saat itu mencapai Rp1.169,97 triliun, dari sebelumnya Rp1.253,72 triliun pada 2006 menjadi Rp2.423,69 triliun pada 2010. Akibatnya, kekayaan bersih (ekuitas) pemerintah membaik dari sebelumnya minus Rp64,45 triliun pada 31 Desember 2006 menjadi positif Rp627,61 triliun pada Desember 2010.

Optimalkan kinerja BMN

Tidak banyak yang tahu, BMN juga berperan strategis dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diungkapkan Direktur BMN, Encep Sudarwan. Dari sisi pendapatan, misalnya, BMN diharapkan dapat memberikan penerimaan negara melalui beragam skema pemanfaatan. Hal ini berlaku juga terhadap sejumlah BMN *idle* yang kinerjanya belum dioptimalkan dengan baik.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan APBN, BMN dijadikan *underlying asset* dalam penerbitan SBSN. Hal ini telah mulai dilakukan pemerintah pada 2008. BMN yang dijadikan *underlying asset* adalah tanah dan gedung pemerintah dengan kriteria tertentu. Tercatat sejak 2008 hingga 2017, nilai total BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN adalah sebesar Rp300,61 triliun yang ditetapkan dalam 355 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penetapan Aset SBSN.

Disamping perannya dalam sisi pendapatan dan pembiayaan dalam APBN, tidak dapat dipungkiri

besarnya dana APBN yang diperuntukkan bagi pengadaan BMN menunjukkan pentingnya pengelolaan BMN yang baik. Encep Sudarwan menyebutkan, jumlah aset BMN yang tersaji dalam LKPP 2017 yang telah diaudit, mencapai 38,35 persen dari total aset yang dimiliki pemerintah. Jumlah ini belum memasukkan hasil revaluasi pada 2017–2018.

Selain mendukung tugas dan fungsi setiap K/L dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pengelolaan BMN yang baik juga bisa mengoptimalkan kinerja BMN dalam meningkatkan penerimaan negara. “Hal ini sesuai dengan arahan Menkeu, agar dalam mengelola dan memanfaatkan aset, kita bisa menghasilkan *revenue* (penerimaan) dan meminimalkan *cost* (biaya),” jelas Encep.

Melejitkan kinerja

Guna mencapai kinerja aset yang optimal, DJKN terus berupaya membangun sinergi yang baik dengan K/L sebagai pengguna dan kuasa pengguna barang. “Dengan itu diharapkan *mindset* sebagai manajer aset juga dimiliki pengguna barang,” jelas Encep.

Dia menambahkan, DJKN juga melaksanakan simplifikasi pengaturan dalam pengelolaan BMN, sehingga proses pengelolaan dapat berjalan secara *prudent* tapi tetap sederhana dalam proses birokrasinya. Tidak hanya itu, kegiatan sinkronisasi terkait perencanaan dan penganggaran juga dikuatkan guna menekan belanja modal agar lebih efisien.

Keterlibatan dengan K/L dalam penelaahan Rencana Kebutuhan BMN yang dibuat K/L, menuntut DJKN untuk lebih andal dalam menentukan biaya terkait pengelolaan BMN. Biaya tersebut diantaranya biaya akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, hingga penghapusan, agar sesuai antara kebutuhan dana dengan penyediaan anggaran.

Tantangan ke depan

Pengelolaan BMN, termasuk juga BMD, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tahap pengelolaan BMN atau biasa disebut siklus BMN memiliki beberapa tahap. Hal tersebut yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan. Di samping itu terdapat pula tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN

Dalam hal penghapusan BMN, prosesnya tidaklah sederhana karena berdampak pada pembebasan tanggung jawab baik administrasi dan fisik bagi pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Untuk itu BMN harus memenuhi beberapa sebab. Diantaranya karena penyerahan BMN kepada pengelola barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain, pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lainnya, adanya kewajiban menjalankan peraturan perundang–undangan, pemusnahan, hingga sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan. Sementara itu yang menjadi sebab suatu BMN dimusnahkan yaitu saat BMN sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundangan.

Diakui Encep, tantangan ke depan dalam mendukung pengelolaan BMN yang baik adalah perlunya database BMN yang valid, dukungan teknologi dan informasi, serta sumber daya pengelola aset yang kompeten. Terlebih lagi, pengelolaan BMN di masa depan bukan hanya sekadar sebagai *cost center*, melainkan menjadi *revenue center* yang bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara lebih optimal.

Teks Farida Rosadi

MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Optimalisasi pengelolaan aset negara menjadi tumpuan pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN digunakan baik untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maupun digunakan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

NILAI BMN

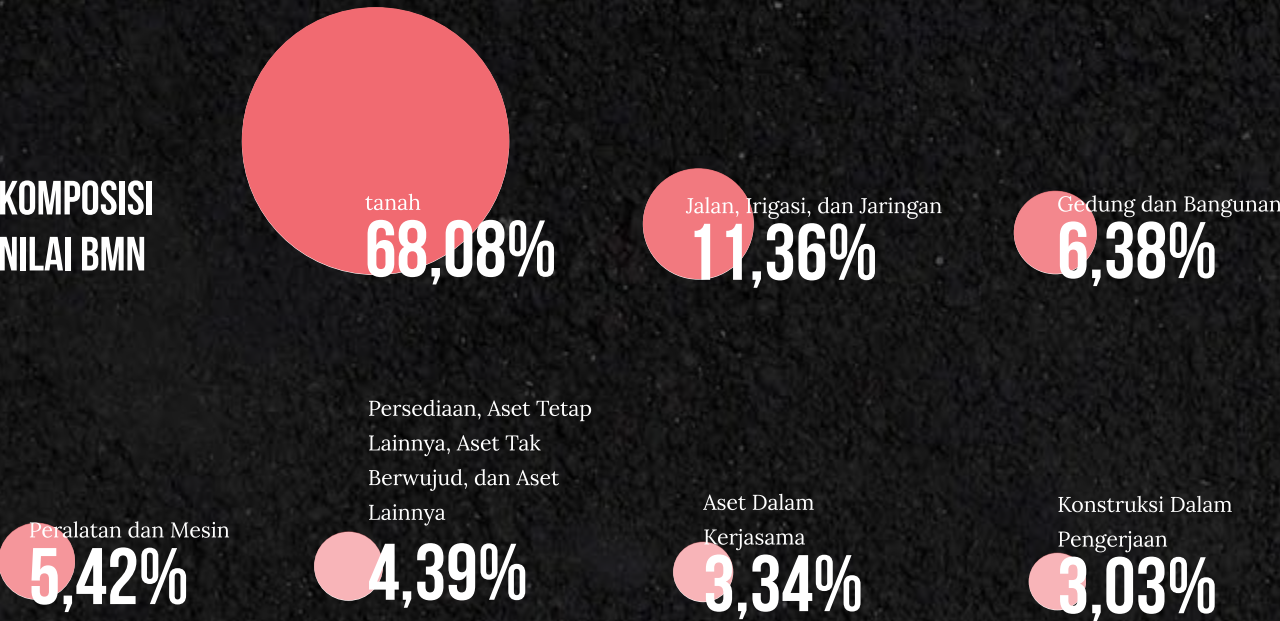
2017 (UNAUDITED)

RP4.191,06 (TRILIUN)

2016 (AUDITED)

RP2.188,36 (TRILIUN)

KOMPOSISI NILAI BMN



JENIS-JENIS BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG DIKELOLA PEMERINTAH

- Persediaan
- Aset Tetap
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan
 - Irigasi dan Jaringan
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Aset Tetap Lainnya (mis: hewan, ikan, tanaman, buku perpustakaan)
- Aset Lainnya
 - Aset Tak Berwujud
 - Aset Dalam Kerjasama
 - Aset Yang Tidak Digunakan Untuk Operasional

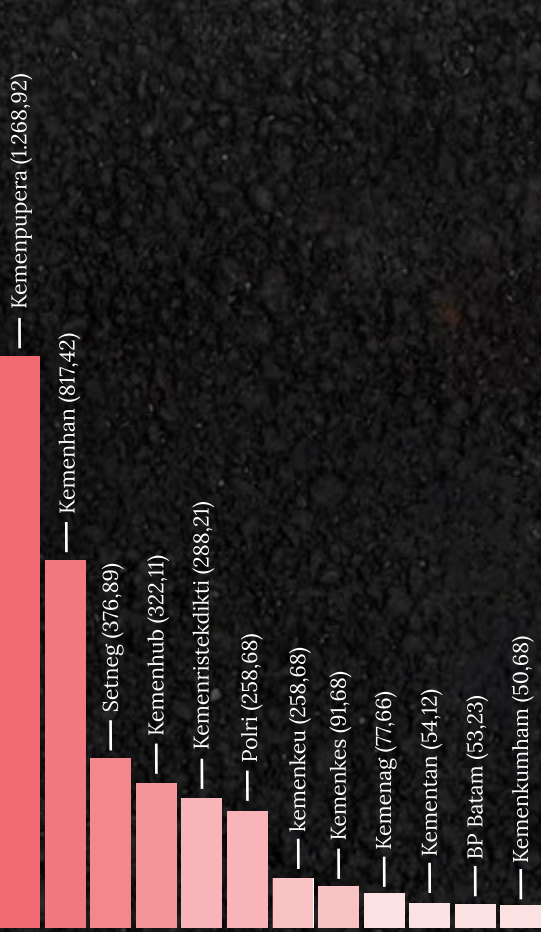
UNTUK MENINGKATKAN NILAI BMN, PEMERINTAH MELAKUKAN REVALUASI ASET DENGAN TUJUAN:

- Memperoleh nilai aset tetap yang update di dalam laporan keuangan;
- Membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari;
- Mengidentifikasi BMN idle; dan
- Meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

TREND PERKEMBANGAN NILAI ASET TETAP (DALAM TRILIUN RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMILIKI BMN DENGAN NILAI DI ATAS RP50 TRILIUN (DALAM TRILIUN RUPIAH)



MENILAI HINGGA PELOSOK NEGERI

Udara malam itu terasa cukup dingin. Jam tangan saya menunjukkan pukul 10 malam. Namun sayangnya pesawat rute Jakarta tujuan Jayapura yang kami tumpangi harus tertunda setengah jam karena padatnya jadwal rute penerbangan di Bandara Soekarno Hatta. Tak lama kemudian, kami menempuh perjalanan tujuh jam lebih dengan satu kali pemberhentian. Sesampainya di Jayapura, jam bandara masih menunjuk angka tujuh pagi. Di sini, kami akan mendampingi Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura untuk melakukan revaluasi aset Barang Milik Negara (BMN) di tepi Sungai Digoel.

Untuk menuju kesana, kami masih harus menunggu kurang lebih empat jam lagi. Tepat pukul 11 siang, penerbangan rute Jayapura tujuan Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel kami tempuh. Perjalanan ke Bandara Tanah Merah ditempuh dengan waktu kurang dari dua jam. Untuk menuju ke Tanah Merah, kami harus menggunakan pesawat

jenis ATR dengan baling-baling tunggal atau ganda dan berkapasitas kabin sepuluh hingga dua puluh penumpang.

Penjara alam

Tanah Merah merupakan ibu kota dari Kabupaten Boven Digoel, daerah pemekaran dari Merauke Provinsi Papua yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Digoel sendiri merupakan suatu nama yang tak asing dalam sejarah perjuangan Indonesia. Banyak tokoh perjuangan Indonesia yang pernah diasingkan dan dipenjara oleh Belanda di daerah ini. Salah satunya adalah tokoh proklamator Indonesia, Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil Bung Hatta.

Ia sempat menjalani penjara alam yang ganas kala itu. Kondisi topografi Digoel yang unik dengan hutan rimba, rawa dalam, hewan ganas, dan sungai besar menjadi pagar tersendiri bagi para tahanan untuk melarikan diri. Selain itu, kondisi demografi lokal yang kurang bersahabat juga menjadi faktor lainnya.

Dari Tanah Merah ke Kampung Asike yang terletak di tepi Sungai Digoel sendiri diperlukan waktu empat jam perjalanan darat. Boven Digoel memiliki topografi yang berkontur perbukitan dan lembah dengan rata-rata ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Wilayah tersebut diapit oleh beberapa sungai yang menyatu



Tim penilai KPKNL Jayapura, DJKN sedang melakukan proses revaluasi

Foto Venggi dan Abdul Azis

di Sungai Digoel dan bermuara ke Laut Arafuru. Beruntung kami dan tim penilai didampingi Tim dari Polres Boven Digoel selaku satuan kerja. Dari Tanah Merah, kami masih harus menyusuri jalan trans papua yang berkelok-kelok dan berkontur naik turun. Hal itu diperparah dengan adanya perbaikan jalan di beberapa titik jalan yang mengakibatkan jalan sulit dilewati saat hujan karena becek dan penuh lumpur. Hal itu ditambah dengan jarak tempuh yang jauh dan kondisi cuaca yang ekstrem menjadi tantangan tersendiri.

Aset tanah

Dari titik awal Kampung Asike, perjalanan masih harus

ditempuh sekitar satu jam menyusuri Sungai Digoel dengan menggunakan perahu mesin tempel. Sesampainya di tepi sungai tujuan, kami pun melanjutkan dengan perjalanan darat sekitar lima belas menit ke lokasi. Di sana terletak sebidang tanah yang merupakan BMN pada Satuan Kerja Polres Boven Digoel. Untuk melakukan penilaian BMN berupa tanah, tim penilai memang diharuskan untuk melakukan survei lapangan.

Walaupun kondisi geografis yang sangat menantang untuk ditempuh, namun tugas menjaga aset negara tetap harus dilaksanakan. Di sinilah peran penting dari KPKNL Jayapura. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, KPKNL Jayapura turut membantu menyukseskan program nasional revaluasi BMN.

Tim penilai

Setidaknya tim penilai terdiri dari 3 orang dalam setiap penugasan. Satu orang bertugas sebagai Ketua Tim yang telah ditetapkan sebagai Penilai. Selanjutnya adalah orang yang bertugas untuk menangani pengelolaan kekayaan negara (PKN) dan teknis aplikasi. Yang terakhir bertugas untuk dukungan data dan koordinasi dengan unit satuan kerja atau pihak terkait. Namun demikian, praktiknya tim selalu bekerja dan berkoordinasi bersama di lapangan. Saat kami mendampingi kegiatan revaluasi KPKNL Jayapura di Boven Digoel, tim penilai yang ditugaskan terdiri dari Ery Kurniawan, Kepala Seksi

Pelayanan Penilaian, sebagai ketua tim, dengan beranggotakan Eko Yuwono, Kepala Seksi Piutang Negara, dan Henika Ulfa Pelaksana Seksi PKN.

Dalam melaksanakan penilaian di lapangan, setidaknya ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan. “Yang pertama itu, penyediaan data awal, kemudian melakukan proses inventarisasi. Yang ketiga baru dilaksanakan proses penilaian, yang keempat tindak lanjut, serta yang kelima adalah monitoring dan evaluasi,” jelas Ery.

Inventarisasi dan penilaian

Sebelum melakukan proses revaluasi, tim penilai harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja terkait untuk penentuan data awal. Selanjutnya, tim akan melakukan survei di lapangan. Persiapan yang matang perlu dilakukan oleh tim penilai karena medan geografis papua yang sangat menantang. Hal itu perlu dilakukan agar survei tidak dilakukan berulang-ulang, serta hal itu juga menjadikan anggaran lebih efisien.

Dalam penilaian aset, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan. “Yang pertama, pendekatan data pasar. Yang kedua adalah pendekatan biaya, dan yang ketiga, pendapatan. Tapi biasanya data sejauh ini kita masih bisa mendapatkan itu dari data pasar. Untuk bangunan itu sesuai aturan kita tidak survei karena kita menggunakan sistem *desktop valuation*”, jelasnya.

Setelah proses inventarisasi selesai, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dalam

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) mengenai keberadaan BMN serta BMN yang belum tercatat, sedangkan data hasil penilaian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Penilaian (SIP) dimana kedua aplikasi ini saling terkoneksi. Hasil penilaian juga diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk memutakhirkan nilai BMN dalam *database*. Untuk memastikan bahwa data data hasil penilaian kembali yang telah diinput dalam aplikasi SIMAK dan SIMAN sudah sesuai maka dilakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi hasil penilaian kembali BMN. Data hasil rekonsiliasi tersebut lah yang akan muncul dalam pelaporan keuangan negara. Dengan semakin tertibnya inventarisasi dan pemutakhiran nilai aset, diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN yang terwujud dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Program nasional

Pada dasarnya, program revaluasi BMN tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Direktur Penilaian DJKN, Meirijal Nur, revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi sebenarnya dapat dilakukan tidak hanya untuk aset, tetapi juga kewajiban dan bentuk kekayaan yang lain. Namun demikian, revaluasi seringkali dikaitkan dengan aset khususnya aset tetap. Revaluasi dapat mengakibatkan nilai aset menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa salah satu latar belakang revaluasi saat ini adalah adanya kebutuhan pemutakhiran *database* aset BMN untuk menjadi *underlying asset* penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, revaluasi BMN juga diharapkan dapat menciptakan aset register. “Dengan adanya aset register, histori BMN akan terlihat mulai dari perolehan sampai kondisi terkini. Ketika sudah memiliki *database* dengan nilai wajar terkini, maka mudah bagi Kementerian Keuangan

c.q. DJKN sebagai pengelola barang untuk mengelola BMN sesuai dengan tugas DJKN yakni mengelola dan mengoptimalkan aset negara,” paparnya.

Tantangan

Di sisi lain, Mei menjelaskan bahwa dalam revaluasi periode ini terdapat dua jenis tantangan. Pertama, dari sisi eksternal, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Barang menjadi salah satu isu tersendiri. “Mungkin belum semua Kementerian/Lembaga paham dan sadar terhadap pentingnya kerapian pencatatan aset. Revaluasi ini penting dan tersebar dengan merata ke semua unsur di Kementerian Lembaga, sehingga koordinasi berpengaruh terhadap dukungan Kementerian/Lembaga dalam menginformasikan data-data yang kita butuhkan untuk menilai, terutama untuk menilai selain tanah,” jelasnya.

Yang kedua, dari internal adalah adanya target penyelesaian revaluasi yang singkat namun beban pekerjaan yang cukup berat. Hal itu terutama apabila dibandingkan dengan revaluasi 2007-2010. Untuk itu, menurutnya konsolidasi internal dan manajemen pekerjaan menjadi penting. Tak luput pula, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting terutama dalam melaksanakan tugas di berbagai medan lingkungan, termasuk sosial dan geografis.

Sebagai contohnya, menurut Kepala KPKNL Jayapura, Bimo

Aryo, di wilayah Indonesia Timur tantangan dalam melaksanakan program revaluasi memang tak sederhana. Berbagai macam potensi risiko baik dari sarana, maupun manusianya juga selalu menghadang. Selain akses geografis yang menantang, sarana komunikasi yang belum memadai, seperti koneksi sinyal telepon dan internet, juga menghambat tim teknis untuk saling berkoordinasi. Selain itu, gejolak sosial keamanan juga menjadi perhatian penting.

Dari sisi eksternal pengguna barang, kemampuan satuan kerja terkait pengelolaan BMN juga menjadi tantangan tersendiri. Tingkat pengetahuan dan kemampuan satuan kerja yang terbatas menyebabkan tim penilai tidak hanya fokus pada tugas penilaian saja, namun juga untuk mendampingi satuan kerja dalam proses revaluasi secara keseluruhan. Di sisi lain, pengembangan kapasitas pegawai di internal sendiri juga belum merata dan perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, sinergi bersama dengan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menjadi salah satu kunci keberhasilan.

“Karena kita targetnya cukup banyak, kita selalu berkoordinasi dan dalam kondisi tertentu meminta bantuan dari Kanwil terutama untuk permasalahan yang dihadapi Tim yang memerlukan penyelesaian di tingkat wilayah dan dalam bentuk bantuan tenaga penilai,” jelasnya.

Teks Abdul Aziz

BMN AWARD TINGKATKAN MOTIVASI



Upaya Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mengelola BMN tentu patut diapresiasi. Sebab itulah, enam tahun terakhir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa BMN Awards. Momen ini diharapkan dapat memotivasi K/L untuk menjaga tren positif pengelolaan BMN di lembaga masing-masing.

Pada BMN Awards 2017 lalu, terdapat 33 penghargaan yang terbagi menjadi 6 kategori, yaitu utilisasi, kepatuhan pelaporan, sertifikasi, tata kelola berkesinambungan, tata kelola antar K/L, dan kinerja terbaik pengelolaan BMN.

BMN Award
tahun 2017.

Foto
Agus Tri
Hananto

Petugas BMN harus selalu memperbaharui pengetahuannya, sementara tidak semua petugas dapat cepat beradaptasi

Christianus Dewanto
Kepala Biro Kerjasama Humas dan Umum Lapan

Juara Umum

Trofi juara umum pada BMN Awards 2017 lalu dimenangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Lembaga ini dianggap mampu mengoptimalkan BMN yang dimiliki.

Kepala Biro Kerjasama Humas dan Umum Lapan, Christianus Dewanto mengatakan, LAPAN mengelola empat jenis BMN. Pertama, tanah dan bangunan seperti gedung kantor, rumah negara, laboratorium, gudang dan bengkel. Kedua, bahan baku terkait teknologi satelit, roket, penerbangan, sains dan antariksa, serta penerbangan jauh.

Selain itu, LAPAN juga memiliki antenna, teleskop, satelit, pesawat, dan alat-alat untuk uji integrasi perakitan. Terakhir, LAPAN juga memiliki aset tak berwujud berupa hasil kajian, data citra penginderaan jauh, dan desain industri.

Dijelaskan Christianus, rekonsiliasi data BMN menjadi prioritas utama Lapan. Setelah data tersebut lengkap, Lapan kemudian melakukan sosialisasi peraturan tentang pemanfaatan BMN kepada semua Satuan Kerja (Satker) yang ada. “Monitoring dan inventarisasi BMN yang dapat dimanfaatkan juga terus kami lakukan. Dengan begitu, kami bisa mendorong kerjasama pemanfaatannya dengan pihak ketiga,” ujar Christianus.

Mengelola BMN juga banyak tantangan. Menurut Christianus, saat ini masih ada peraturan yang belum harmonis. Dia mencontohkan, ada pandangan yang berbeda penataan rumah negara golongan III antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kemenkeu.

KemenPUPR sebagai pembina rumah negara bertugas untuk menjalankan penjualan rumah negara, khususnya untuk membantu Aparatur Sipil Negara memiliki tempat tinggal. Namun, proses ini belum dapat dilakukan karena Kemenkeu menganggap masih ada kekosongan hukum yang mengatur rinci mengenai BMN berupa rumah negara. “Untuk itu, kami harus terus berkoordinasi secara intensif dengan semua pihak terkait,” kata Christianus.

Selain itu, kebijakan pengelolaan BMN yang terus berkembang turut berdampak pada perubahan sistem informasi majamen aset. “Petugas BMN harus selalu memperbaharui pengetahuannya, sementara tidak semua petugas dapat cepat beradaptasi,” kata

Christianus. Untuk itu, dirinya berharap, DJKN dapat segera mengusulkan petugas fungsional BMN yang dibina secara khusus untuk mengelola BMN.

Kemenkeu, Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN

Setelah Lapan, Kemenkeu juga meraih penghargaan terbaik nomor dua untuk kategori Kinerja Pengelolaan Terbaik BMN. Selain itu, Kemenkeu juga meraih penghargaan dalam 3 kategori lainnya yaitu utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, dan tata kelola berkesinambungan.

Kepala Biro Perlengkapan Yudi Pramadi mengungkapkan, Kemenkeu memiliki BMN dengan total nilai lebih dari Rp110 triliun. Dari nilai tersebut, sebesar 95,67 persen berupa tanah dan bangunan yang digunakan oleh 1.091 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Optimalisasi BMN dilakukan dengan memberi solusi pemenuhan kebutuhan Satker. Yudi mencontohkan, bila di suatu daerah terdapat kebutuhan gedung kantor oleh Satker A dan di daerah yang sama terdapat gedung kantor yang tidak digunakan oleh Satker B, maka gedung kantor yang tidak digunakan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Satker A.

Selanjutnya, apabila di daerah tersebut belum terdapat kebutuhan BMN, sementara masih ada BMN yang tidak digunakan oleh Satker setempat, maka optimalisasinya adalah berupa pemanfaatan. Misalnya dengan cara menyewakan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Yudi mengaku tidak ada program khusus yang dilakukan terkait BMN Awards. “Itu bukan tujuan akhir kami. Yang jelas, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan BMN,” ujar Yudi.

Ada beberapa inisiatif strategis yang diterapkan oleh Biro Perlengkapan. Pertama, percepatan utilisasi BMN. Kedua, peningkatan koordinasi dalam sertifikasi tanah, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penyampaian laporan BMN Kemenkeu dengan secara tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan pengadaan secara bertahap menggunakan analisis *Total Cost Ownership*. Terakhir, Biro Perlengkapan berkoordinasi dengan intensif dengan DJKN selaku pengelola barang.

Teks Irma Kesuma



Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata

Foto
dok. DJKN

PENILAIAN KEMBALI UNTUK KETAHANAN EKONOMI

Sejak tahun lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah memulai program revaluasi aset Barang Milik Negara (BMN). Target program ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2018. Apa saja manfaat dan program dalam revaluasi aset BMN? Simak wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, berikut ini.

Mengapa pengelolaan aset BMN perlu dilakukan?

Kalau kita punya mobil, pasti kita akan peduli dengan mobil kita, begitu juga dengan rumah. Mengapa? Karena untuk mendapatkannya tidak mudah. Begitu juga dengan aset BMN, bahkan perjuangan mendapatkannya sangat historik dan heroik di masa-masa kemerdekaan dahulu. Terkait dengan *financial*, BMN merupakan semua barang milik negara yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BMN digunakan baik

untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maupun digunakan oleh masyarakat seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Maka tentunya kita ingin aset tersebut terawat dan dimanfaatkan dengan baik supaya apa yang kita belanjakan tidak sia-sia.

Jenis aset apa yang termasuk dalam pengelolaan BMN?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Jenis BMN terbagi menjadi tiga. Pertama, Persediaan. Kedua, Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya (seperti hewan, ikan, tanaman, buku perpustakaan). Ketiga, Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, Aset dalam Kerjasama, dan Aset yang tidak digunakan untuk operasional.

Selain itu, terdapat BMN yang berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), seperti Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Aset *Idle* yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga.

Bagaimana perkembangan pengelolaan aset BMN di Indonesia?

Sebetulnya perkembangannya sudah cukup baik ya, tapi kita *kan* tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita capai. Kalau kita amati, sebelum 2004 kita bahkan tidak punya laporan keuangan pemerintah. Waktu itu aset kita mungkin diinventarisir tapi kita tidak pernah punya daftar aset yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga tidak pernah diketahui pengeluaran aset dari APBN itu hasilnya untuk apa. Setelah ada DJKN tahun 2005, baru mulai diinventarisasi dan dilakukan penilaian.

Pengelolaan BMN dengan paradigma baru dimulai dengan melakukan pembenahan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi organisasi. Dari sisi regulasi penyempurnaan dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai tonggak Pembenahan Pengelolaan BMN/D. Upaya pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan Barang Milik Negara terus dilakukan dengan

menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya PP Nomor 38 Tahun 2008.

Bagaimana perkembangan BMN dalam LKPP?

Pengelolaan aset BMN juga ikut memberikan sumbangsih bagi perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang selama Tahun 2004 s.d 2008 masih memperoleh opini *disclaimer*. Perbaikan itu dilaksanakan melalui program penertiban BMN (inventarisasi dan penilaian) pada tahun 2007 s.d 2010. Hasilnya, penertiban BMN yang dilakukan ikut memberi andil dalam perbaikan kualitas opini BPK pada LKPP. Perbaikan itu dimulai pada LKPP Tahun 2009 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan berbagai upaya perbaikan lainnya sehingga pada LKPP Tahun 2016 *Audited* Pemerintah memperoleh opini WTP.

Menteri Keuangan pernah menyebutkan bahwa aset perlu dilakukan optimalisasi, jangan menjadi cost. Apa saja yang dilakukan DJKN dalam melakukan optimalisasi aset BMN?

Pertama, saat ini DJKN sedang melakukan revaluasi aset BMN. Di dalam revaluasi aset tersebut ada dua aktivitas utama, yaitu inventarisasi dan penilaian. Inventarisasi berarti kita memastikan bahwa yang tercatat dalam daftar BMN kemudian dilaporkan di LKPP secara komprehensif. Jangan sampai ternyata masih ada BMN yang tercecer. Dengan adanya revaluasi, kita punya *added value* dari aset kita dan gambaran kalo kita misalnya

mau memanfaatkan BMN ini, misalnya dengan menyewakan. Kedua, penilaian itu dilakukan untuk membuat estimasi penyewaan. Ketiga, kita juga ingin memastikan pemanfaatan BMN ini juga sekarang menjadi lebih tertib. Hal ini juga sangat ditekankan kepada kementerian/lembaga agar mereka menggunakan BMN ini dengan sebaik-baiknya.

Apa manfaat dari pengelolaan aset atau revaluasi aset terhadap masyarakat Indonesia?

Selama ini pemerintah selalu berupaya membelanjakan APBN secara efektif dan efisien agar bisa bisa dibelanjakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kedua hal itu merupakan belanja yang tidak bisa terlihat fisiknya, selain bisa melihat anak Indonesia lebih sehat dan pintar. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga ingin melihat hasil belanja pemerintah secara fisik. Maka dengan adanya revaluasi aset BMN ini, masyarakat bisa tenang mengetahui bahwa pemerintah berkomitmen membelanjakan APBN secara tepat sasaran.

Selain itu, revaluasi aset ini juga bermanfaat untuk memperoleh *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, sehingga seluruh BMN dapat ter-*utilisasi* secara penuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa. Kemudian, revaluasi aset mampu meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN ini pada akhirnya menguatkan postur APBN kita dalam menunjang prioritas pembangunan nasional.

Teks Pradany Hayyu



Indonesia semakin ramah untuk investasi.

Foto
Resha Aditya Pratama

Peraturan Kemenkeu Kian Sederhana

Kemudahan proses perizinan adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu di dukung regulasi yang sederhana untuk mendorong ekspor yang akan membuka peluang investasi. Rina Widiyani Wahyuningdyah, Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan akan menjelaskan fokus penyederhanaan regulasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini untuk mendukung kegiatan berusaha di Indonesia.

Seperti apa gambaran regulasi di Indonesia, khususnya terkait investasi?

Ada banyak regulasi terkait investasi. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang di bidang penanaman

modal, kepariwisataan, perindustrian, Pemerintahan Daerah, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, beserta peraturan pelaksanaannya.

Saat ini, pemerintah tengah menata kembali kebijakan yang tertuang dalam berbagai regulasi. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan dan penyelesaian hambatan berusaha. Kedua, untuk mendorong perkembangan kawasan tertentu, misalnya kawasan industri dan kawasan pariwisata.

Selain itu, Indonesia juga perlu menyederhanakan peraturan terkait standar pelayanan. Perlu diciptakan pemberian layanan yang lebih cepat dan mudah dengan menggunakan sistem



Rina Widiyani
Wahyuningdyah,
Kepala Biro
Hukum, Setjen,
Kementerian
Keuangan

Foto
Dok. Pribadi

perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*.

Untuk mendukung penanaman modal atau investasi, telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelesaian perizinan berusaha, baik di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota diminta untuk mengevaluasi regulasi yang terkait dengan proses perizinan berusaha. Tak kalah penting, mereka juga harus meningkatkan kualitas layanan.

Bagaimana kondisi regulasi di Kemenkeu saat ini?

Dalam rangka mendukung iklim penanaman modal lebih kondusif, Kementerian Keuangan memprakarsai berbagai regulasi antara lain pemberian insentif fiskal dan perlakuan perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, serta di kawasan industri.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi, Kemenkeu juga telah menerbitkan berbagai regulasi di berbagai tingkatan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPR mengenai RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bertujuan untuk menyederhanakan pungutan PNBP, khususnya yang terkait dengan layanan dasar masyarakat.

Kemenkeu juga berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan berbagai regulasi yang terkait dengan insentif perpajakan daerah, antara lain melalui pemberian dana insentif bagi daerah dengan kriteria utama kinerja daerah.

Apa contoh regulasi di Kemenkeu yang disederhanakan?

Pada prinsipnya regulasi Kemenkeu disusun untuk mendukung investasi. Untuk sebab itu, regulasi terus menerus disempurnakan, dengan fokus penyederhanaan proses perizinan, penyederhanaan mekanisme, dan optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis IT.

Ada beberapa contoh regulasi yang disederhanakan. Pertama, PMK Nomor 147 Tahun 2017 yang menyederhanaan persyaratan administrasi pendaftaran Wajib Pajak (WP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Kedua, PMK Nomor 29 Tahun 2018 yang menyederhanaan proses izin penyelenggaraan dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB) melalui media elektronik, serta percepatan pemrosesan dokumen. Ketiga, PMK Nomor 28 Tahun 2018 yang menyempunakan dan menyederhanakan prosedur pelayanan, pengawasan, dan otomasi pada Pusat Logistik Berikat.

Keempat, PMK Nomor 35 Tahun 2018 yang lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib WP dalam mendapatkan fasilitas pengurang pajak penghasilan. Kelima, penerbitan PMK Nomor 39 Tahun 2018 yang menyederhanakan prosedur penetapan WP kriteria tertentu dan WP pengusaha kena pajak risiko rendah. PMK ini juga menyederhanakan proses pemberian restitusi.

Keenam, penerbitan PMK Nomor 31 Tahun 2018 yang mengatur penggantian penerbitan SBN/SUN Ritel, dari semula

Penyederhanaan regulasi sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Semula, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah PMK dan KMK. Caranya dengan menginventarisasi, menyempurnakan dan menggabungkan serta mengganti PMK/KMK yang sudah tidak sesuai.

secara manual menjadi secara *online*, sehingga transaksi pembelian SBN atau SUN ritel menjadi lebih mudah dan cepat, disamping itu juga akan memperluas basis investor.

Ketujuh, penerbitan PMK Nomor 204 Tahun 2017 yang memangkas/mempercepat jalur pemberian izin dari yang semula dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai a.n. Menkeu, sekarang cukup oleh Kakanwil atau KPU a.n. Menkeu. PMK ini juga mengatur pemberian izin pengusaha toko bebas bea melalui sistem komputer pelayanan.

Kedelapan, penerbitan PMK Nomor 68 Tahun 2017 yang menyederhanakan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Kesembilan, penerbitan PMK Nomor 179 Tahun 2016 yang mengatur penggunaan sistem elektronik dalam registrasi kepabeanan.

Seperti apa proses penyederhanaan regulasi di Kemenkeu?

Penyederhanaan regulasi sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Semula, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah PMK dan KMK. Caranya dengan menginventarisasi, menyempurnakan dan menggabungkan serta mengganti PMK/KMK yang sudah tidak sesuai.

Dalam perkembangannya, pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Desember 2015 di Istana Bogor, Bapak Presiden meminta kepada semua pimpinan K/L, gubernur, serta bupati dan walikota untuk memangkas regulasi yang diterbitkan tahun 2006-2015 di bawah kewenangan masing-masing. Target pemangkasan

adalah 50% (lima puluh persen) dari sekitar 42 ribu regulasi.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan Sekretaris Utama Bappenas telah menandatangani kesepakatan bersama untuk penyederhanaan regulasi yang diterbitkan/diprakersai oleh Kemenkeu. Kegiatan ini diawali dengan inventarisasi terhadap PMK yang sifatnya mengatur atau *regelling* dan diterbitkan oleh Kemenkeu tahun 2006-2015.

Target penyederhanaan regulasi tersebut tersebut telah dipenuhi oleh Kemenkeu dan dilanjutkan hingga sekarang. Pengembangannya kini difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis, birokrasi, mekanisme, dan optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis IT.

Apa tantangan dalam menyederhanakan regulasi?

Untuk mendukung investasi, regulasi yang diterbitkan harus memperhatikan kebutuhan pelaku usaha. Sementara, peraturan perundang-undangan sering terlambat merespon kebutuhan tersebut. Untuk itu, perlu diciptakan dan diupayakan penerbitan regulasi yang fleksibel dan adaptif namun tetap memperhatikan asas-asas hukum dan aspek *legal drafting*.

Guna mengisi kekosongan hukum, perlu dilakukan berbagai terobosan yang tentunya menimbulkan berbagai pandangan dari para ahli hukum khususnya yang menganut paham normatif dogmatis.

Untuk itu, Kemenkeu berupaya terus mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan. Selain agar semua pihak memiliki pemahaman yang tepat dan sama terhadap kebijakan tersebut, tak kalah pentingnya strategi komunikasi juga perlu dilakukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Apa dampak penyederhanaan regulasi terhadap peringkat kemudahan berusaha?

Regulasi yang sederhana akan ikut berperan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi yang lebih efektif dan efisien.

Karena regulasi yang sederhana akan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pelaku usaha, dapat meningkatkan kepatuhan, mempercepat proses layanan yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan iklim investasi serta pembangunan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Teks Irma Kesuma

KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa

Mendulang Rupiah di Tambang Sumbawa

Namanya memang tak sepopuler Bali ataupun setenar Lombok, namun pulau ini tawarkan penerimaan di bidang bea dan cukai yang menjanjikan. Adalah Sumbawa, tanah samawa di ujung timur provinsi Nusa Tenggara Barat. KPPBC TMP C Sumbawa siap mengawal pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di pulau terbesar se-wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini.



Rudie Bayu, Kepala KPPBC TMP C Sumbawa

Foto Dok. KPPBC TMP C Sumbawa

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sumbawa membawahi empat kabupaten (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima) dan satu kotamadya (Bima) di Pulau Sumbawa. Tak hanya memiliki wilayah geografis terluas, kantor ini juga mengemban target penerimaan bea masuk dan bea keluar terbesar. Persentasenya 60,78 persen dari total target pendapatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang menaungi KPPBC TMP C Sumbawa.

Pembebanan tanggung jawab yang cukup berat tersebut bukannya tidak berdasar. Keberadaan lokasi pengelolaan dan eksplorasi tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau yang masuk dalam wilayah kerja kantor ini menjadikannya layak mengemban amanah tersebut. Memang, lebih dari 90 persen penerimaan yang didapat kantor ini berasal dari bea keluar ekspor produk yang dihasilkan dari tambang PT. AMNT.

Mendulang hasil tambang

Eksplorasi tambang di Batu Hijau yang dikelola oleh PT. AMNT sudah berlangsung sejak tahun 2000. Hingga kini, perusahaan eksplorasi mineral berharga di kawasan obyek vital nasional ini telah menghasilkan kurang lebih 3.6 juta ton tembaga dan 8 juta ons emas dari tambang yang berada di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Produk yang dihasilkan dari tambang di Sumbawa berupa konsentrat (butiran yang lebih halus dari pasir) yang mengandung mineral berharga seperti tembaga, perak, dan emas.

Tiap hari tambang tersebut mengolah batuan tua dari perut bumi menjadi ribuan ton konsentrat siap kirim. Setidaknya, tiap tiga minggu sekali produk hasil tambang tersebut

dikirim menggunakan kapal ke berberapa destinasi internasional, di antaranya Tiongkok dan Jerman. Dari aktivitas inilah KPPBC TMP C Sumbawa menjalankan peran pentingnya.

Penerimaan bea keluar produk konsentrat dari tambang tersebut di tahun 2017 mencapai Rp1.253.047.630.892. Hasil tersebut mencapai persentase sebesar 131,72 persen dari target sebesar Rp951.331.003.000 yang dibebankan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT kepada kantor ini. Prestasi penerimaan tersebut telah menyumbang 75 persen total target tahun 2017 yang ingin dicapai oleh Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT yang berkisar di angka Rp1,6 triliun.

”Bahkan tahun 2017 kami menyumbang penerimaan bea keluar terbesar di Indonesia. Lebih besar dibanding Papua” buka Rudie Bayu, Kepala KPPBC TMP C Sumbawa. Secara topologi, memang hanya ada dua kantor vertikal bea dan cukai yang mengurus hasil pertambangan di Indonesia. Selain di Sumbawa ini, satu kantor serupa terdapat di Amamapare Papua.

Optimalkan beragam pelayanan

Ekspor konsentrat hasil pertambangan Batu Hijau bisa dibilang memang menjadi fokus utama pengawasan dan pelayanan yang diberikan di KPPBC TMP C Sumbawa. Namun selayaknya kantor vertikal bea dan cukai lain, kantor ini juga memberikan layanan di sektor dan pada *stakeholder* lainnya. Beban kerja yang harus dikerjakan pun beragam.

Secara bergilir tiap minggunya, beberapa petugas dikirim ke beberapa pos pengawasan yang tersebar di penjuru pulau ini. Beberapa petugas dikirim ke Port Benete, pelabuhan khusus pelayanan hasil tambang PT AMNT. Ada yang diutus ke Bima untuk mengurus segala perizinan ekspor jagung. Sisanya ditugaskan ke Calabai, di sana fokus utamanya adalah pelayanan impor *raw sugar* untuk bahan baku pabrik penghasil gula di



Petugas BC memeriksa gudang hasil tambang PT. AMNT

Kantor KPPBC TMP C Sumbawa

Kegiatan para pejabat dan pegawai di luar kantor.

Foto Resha Aditya Pratama

Kabupaten Dompu tersebut. Pengawasan terhadap kecurangan, seperti distribusi tembakau iris dari Jawa dan Lombok, serta pelanggaran lainnya juga terus dilakukan dengan mengadakan operasi pasar.

Wilayah geografis yang luas dan infrastruktur yang masih tahap pengembangan menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas di sana. Untuk mencapai pos pengawasan di daerah-daerah tersebut mereka harus menempuh perjalanan darat. Beberapa diantaranya harus memakan durasi yang panjang dan medan berat untuk sampai di tujuan yang bisa dibilang cukup terpencil.

Kreativitas ciptakan totalitas

Secara fisik dan struktural, KPPBC TMP C Sumbawa memang merupakan kantor yang kecil. Lokasinya menempati sebuah bangunan rumah sederhana di lingkungan Pelabuhan Badas. Abdi negara yang bertugas di sana pun hanya berjumlah 33 orang saja. Itupun harus dibagi untuk mengawasi ke beberapa kantor perwakilan di daerah. Sehari-hari hanya ada belasan pegawai yang *stand by* di kantor pusat KPPBC TMP C Sumbawa.

Meski jauh dari ideal, Kepala Kantor terus tanamkan kerja sama tim berlandaskan rasa kebersamaan. Keterbatasan jumlah pegawai dibanding dengan cakupan luas geografis dan beban kerja mengharuskan seluruh jajaran untuk mau bekerjasama lintas seksi. ”Pak Rudie selalu



tanamkan bahwa kreativitas bukan penghalang dari segala keterbatasan. Tim ini adalah sebuah keluarga, suatu kesatuan yang memiliki cita-cita bersama yaitu terus berkontribusi dan mempertahankan prestasi” tegas Irwan Riyadi, Kepala Subbagian Umum KPPBC TMP C Sumbawa mewakili Kepala Kantor.

Tahun 2019 digadang-gadang menjadi realisasi rencana pengembangan KPPBC TMP C Sumbawa. Diharapkan pembangunan gedung kantor di lokasi baru yang lebih representatif akan mulai dikerjakan. Kedepannya, kantor ini juga akan mengajukan usulan untuk penambahan jumlah pegawai yang lebih ideal. Performa pun terus ditingkatkan sehingga layanan kepada *stakeholders* bisa lebih maksimal.

Langkah-langkah tersebut dianggap perlu. Seiring dengan rencana pembangunan smelter oleh PT. AMNT yang pastinya akan meningkatkan beban kerja KPPBC TMP C Sumbawa. Selain itu secara umum, Pulau Sumbawa merupakan daerah potensial yang masih akan terus berkembang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) makin digenjut, pariwisata terus dipoles, perkebunan jagung juga akan tetap dikembangkan. Semua faktor tersebut pastinya akan beririsan dengan tugas dan fungsi kantor ini dalam pemberian layanan dan pengawasan bea dan cukai di tanah Samawa.

Teks Dimach Putra

Peneliti Yang Bersinergi

Brahmantio Isdijoso,
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Tubuh kecil anak itu duduk termangu di kursi makan. Dengan kagum ia mendengarkan banyak kisah menarik terkait permasalahan sosial dan ekonomi yang sedang terjadi di negerinya. Sehabis makan malam, telah menjadi kebiasaan keluarganya untuk saling bercengkerama. Ibunya yang juga berprofesi sebagai peneliti banyak menceritakan topik-topik yang tak jauh dari isu sosial ekonomi. Dari cerita tersebut, ia belajar untuk memahami masalah yang terjadi di sekitarnya.

Melalui rangkaian cerita tersebut, salah satu topik yang menarik baginya adalah cara memahami perilaku manusia (*human behaviour*), terutama terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Saking tertariknya dengan cerita sang ibu, ia terinspirasi pula untuk menjadi peneliti. Itulah Brahmantio Isdijoso yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (PRKN) Direktorat



Foto
Anas Nur Huda

Foto
Anas Nur Huda

Brahmantio
Isdijoso
bersama
keluarga

Foto
Dok.Pribadi



Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Setelah hampir lima belas tahun turut memberikan warna pada kebijakan publik melalui hasil penelitiannya, kini ia pun ingin berkontribusi lebih besar melalui jabatan struktural. Dengan demikian, ia berharap dapat memberikan sumbangsih dan mengabdikan kepada bangsa dan negaranya.

Dari peneliti ke pejabat struktural

Pasca kelulusan gelar masternya di IPB pada tahun 1991, Brahmantio membantu salah satu dosennya yang bekerja sama dengan Universitas Harvard untuk mengembangkan bidang *policy* dan *research* di Kementerian Keuangan. Setelah itu, ia pun berhasil diterima di Kementerian Keuangan sebagai salah satu peneliti di Badan Analisa Keuangan dan Moneter yang merupakan cikal bakal Badan Kebijakan Fiskal (BKF) saat ini. Saat itu, jumlah peneliti di Kementerian Keuangan masih sangat sedikit.

Sebagai peneliti, ia melakukan penelitian di berbagai bidang yang terkait keuangan negara. Salah satunya, ia pernah diminta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) sebelum bertransformasi menjadi DJPPR untuk melakukan penelitian mengenai Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Hampir tiga tahun ia dan tim melakukan penelitian tersebut. Alhasil, hasil analisis mereka pun berhasil menjadi dasar dalam penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang pertama.

Sejak bekerja sebagai peneliti pada tahun 1991, ia ditawarkan untuk memimpin jabatan struktural di BKF pada tahun 2006. Saat itu, BKF memang sedang melakukan proses reformasi seiring dengan *landscape* reformasi Kementerian Keuangan. Ia ditempatkan sebagai Kepala Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah. Lima tahun berselang, ia dipindahtugaskan untuk memimpin Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal. Terakhir, pada 2015, seiring transformasi DJPU menjadi DJPPR, ia

pun dipromosikan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Fiskal.

Pemimpin dan mitra kerja

Menjadi struktural memiliki tantangan tersendiri bagi Brahmantio. Ia sadar dengan memilih jabatan karier struktural, ia memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi secara lebih luas dan besar kepada masyarakat dan negara.

“Jadi, saya menjadi bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, dapat memberikan pertimbangan langsung kepada level *decision maker*, serta bisa juga meng-*influence* orang, termasuk cara berfikir bagaimana harus melihat suatu hal itu dari *angle* yang tepat. Kesempatan berkontribusi itu justru lebih luas ada di posisi struktural,” jelasnya.

Sementara itu, pengalamannya bekerja sebagai peneliti memberikan gaya kepemimpinan tersendiri. Semasa menjadi peneliti, ia memiliki prinsip bekerja secara *teamwork* dan kemitraan atau

Selalu belajar itu artinya bukan hanya ikut training atau mengambil pendidikan jenjang yang lebih tinggi, tapi selalu belajar dalam arti mengambil *lesson learned* dari apa yang kita kerjakan dan kita selesaikan. Karena pengalaman itu lah yang harus jadi guru kita.

Brahmantio Isdijoso,
Direktur Pengelolaan
Risiko Keuangan
Negara

partnership. Dengan demikian, setiap rekan kerja merupakan teman dalam bekerja. Hal itulah yang ia bawa dalam memimpin organisasinya. Ia lebih senang menganggap bawahannya sebagai *partner* dalam bekerja.

Bahkan, ia juga selalu memperhatikan kondisi dan performa dari setiap staf yang ia anggap sebagai mitra kerjanya. Misalnya, ia selalu memberi apresiasi kepada staf yang berulang tahun. “Biar kita bisa selalu mengingatkan ke teman-teman kalau tambah umurnya harusnya kontribusi juga semakin banyak, semakin baik begitu. Minimal membuat mereka yakin dengan diri sendiri bahwa dengan berulang tahun itu hari esok bisa lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Itu yang harus kita ingat dalam hal bekerja maupun secara umum,” paparnya.

Terinspirasi menjadi peneliti

Memiliki Ayah, Isdijoso Karjadi, dan Ibu, Sri Hartiniadi, yang merupakan alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi cikal bakal Brahmantio untuk menyelesaikan gelar sarjana dan masternya di IPB. Ibunya merupakan salah satu peneliti di Departemen Pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari Brahmantio kecil sering mendengar cerita terkait sosial dan ekonomi yang menjadi bidang penelitian sang ibu.

“Saya pikir figur ibu banyak memberikan pengaruh ke saya kenapa kemudian saya juga ingin mengenal penelitian. Nah, dari semua rangkaian cerita itu yang paling menarik itu adalah topik memahami *behaviour* manusia. Itu menurut saya dari cerita-cerita waktu saya masih SMP sampai SMA mendengarkan obrolan dari Ibu,” jelasnya.

Melalui buku-buku yang dimiliki oleh ibunya, ia mulai mencoba untuk mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah keterkaitan antara ilmu ekonomi dengan keputusan rasional yang diambil oleh manusia. Menurutnya, hubungan tersebut dapat diukur melalui salah satu cabang ilmu ekonomi yang disebut ekonometrika. Ilmu tersebut juga menjadi dasar teori yang digunakan dalam penelitian tugas akhirnya.

“Bagaimana keputusan itu diambil ternyata sebenarnya kita bisa mengukur *behaviour*-nya. Itu lah pelajaran ekonometrika. Dan pada waktu itu saya coba cari dimana-mana waktu saya SMA dulu kan belum ada. Saat itu, universitas yang mengajarkan mata pelajaran ekonometrika itu cuma di IPB (Institut Pertanian Bogor),” ungkapnya.

Di sisi lain, sosok ayah turut menginspirasi untuk bekerja dengan berbagai kondisi yang ada. Ayahnya menanamkan nilai agar tidak menunda-nunda pekerjaan, serta selalu akuntabel tidak hanya dalam proses bekerja tetapi juga terhadap hasil akhir. Dengan begitu, ia akan terbiasa untuk memastikan

pencapaian dari target yang diinginkan.

Dukungan keluarga

Agenda padat sebagai Direktur PRKN membuat Brahmantio harus bisa mengatur waktu bersama keluarganya. Di sela-sela kegiatan Sabtu-Minggu, ia sempatkan untuk menemani keluarga berolahraga atau makan bersama di luar rumah. Meski begitu, istrinya, Hania Rahma, dan ketiga anaknya, M. Ratih Rahmaditio, Arika Fadhia Rahmi, dan M. Reza Rahmaditio, sudah memahami tanggung jawab dan risiko pekerjaan dirinya. Untuk mengatasi jarak dan kesibukan masing-masing, ia juga menyempatkan berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi di gawai pintar.

Harapan

Sementara itu, Brahmantio menaruh harapan besar terhadap institusi serta sumber daya manusianya. Pertama, ia berharap setiap pegawai memiliki motivasi untuk selalu belajar. “Jadi selalu belajar itu artinya bukan hanya ikut *training* atau mengambil pendidikan jenjang yang lebih tinggi, tapi selalu belajar dalam arti mengambil *lesson learned* dari apa yang kita kerjakan dan kita selesaikan. Karena pengalaman itu lah yang harus jadi guru kita,” ungkapnya.

Terhadap institusi Kementerian Keuangan, ia memiliki harapan agar proses transformasi terus berjalan. Hal itu menjadi hal yang krusial karena sebagai organisasi pelayanan publik, Kementerian Keuangan akan selalu berinteraksi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, organisasi yang mampu melakukan adaptasi dengan cepat menjadi sebuah kebutuhan.

Teks Abdul Aziz

Stabilitas di Atas Pertumbuhan

Foto
Resha Aditya
Pratama.

Perekonomian Indonesia sampai dengan bulan Mei 2018 masih relatif kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Perhatian pada sektor ini telah mengundang reaksi para pelaku di pasar keuangan dan turut mempengaruhi keseimbangan eksternal Indonesia. Oleh pihak luar, Indonesia tetap dipandang kuat, tidak seperti *emerging market* lain, yaitu Argentina dan Turki. Komunikasi kebijakan oleh regulator terbilang baik. Namun, implementasi kebijakan ke depan tetap perlu diperhatikan.

Ketidakpastian Global Meningkat

Terdapat tiga sumber ketidakstabilan ekonomi global. Pertama, dampak pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap sektor keuangan global. Seiring pemulihan ekonomi AS yang semakin cepat, otoritas kebijakan moneter AS memberikan sinyal besar kemungkinan *Fed Fund Rate* (FFR) akan meningkat dengan fase yang semakin cepat pula.

Selain inflasi, terdapat urgensi yang lebih besar untuk meningkatkan suku bunga agar tidak terjadi kondisi yang dinamakan *crowding out*, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. *Crowding out*, dalam kasus AS, digambarkan sebagai meningkatnya pinjaman pemerintah yang dapat menyebabkan penurunan jumlah dana yang dapat dipinjam oleh sektor bisnis.

Peningkatan pinjaman berasal dari defisit fiskal yang meningkat untuk membiayai program *tax cut* di negara tersebut. Apabila tidak direspons dengan peningkatan tingkat bunga, *crowding out* berisiko terjadi. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat *output* perekonomian (Produk Domestik Bruto/PDB).

Ekspektasi kenaikan bunga yang semakin kuat ini mendorong terjadinya gejolak pada pasar keuangan. Dolar AS sebagai salah satu mata uang *safe haven* menjadi meningkat tajam. Hal ini merespons kemungkinan harga uang

yang meningkat. Sebagai gambaran, Dollar Index meningkat sebesar 1,85 persen secara *year to date* per 5 Juni 2018 terhadap beberapa mata uang negara mitra dagang AS.

Ketidakpastian kian menjadi saat tingkat imbal hasil surat berharga negara AS meningkat sebesar 18,9 persen secara *year to date* menuju 2,86 persen pada akhir Mei 2018. Hal ini seiring dengan FFR yang mencapai 1,75 persen pada Mei 2018. Hal ini berimbas pada negara lainnya, termasuk *emerging market*.

Beberapa sumber instabilitas ekonomi dunia lainnya yang menjadi perhatian adalah kondisi Euro Zone (EZ), dimana Italia merencanakan untuk keluar dari EZ di tengah utang publik negara tersebut yang mencapai 132 persen dari PDB. Selain itu, dampak kebijakan proteksionisme perdagangan yang mulai diimplementasikan oleh beberapa negara maju juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Dampak ke Emerging Market

Disamping menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia juga masih merupakan *capital importing country*, sebagaimana tercermin pada defisit transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (CAD). Mengingat kedua hal ini, maka potensi *spillover* dari kondisi negara-negara sejenis sebagai imbas dari penguatan Dolar AS juga perlu dicermati. Terdapat dua negara *emerging market* yang sektor keuangannya mengalami gejala yang cukup signifikan, yaitu Turki dan Argentina.

Turki, misalnya, negara dengan CAD per PDB sebesar 5,5 persen di akhir 2017, mengalami gejala nilai tukar yang cukup dalam. Per 5 Juni 2018, Lira mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 19 persen secara *year to date* menuju 4,59 per dolar AS. Bahkan, nilai terendah sepanjang sejarah tercatat di bulan Mei sebesar 4,71 Lira per dolar AS. Pelemahan ini jauh lebih tinggi dari negara lainnya di kawasan regional.

Merespons nilai tukar yang tertekan, kebijakan moneter Lira diperketat dengan meningkatkan 300 basis poin menuju 16,5 persen dengan tingkat inflasi yang juga tinggi sebesar 12,98 persen (*year on year*). Hal ini dinilai baik guna menjaga agar daya saing eksternal tidak jatuh semakin dalam, mengingat inflasi yang juga cukup tinggi.

Aksi kebijakan ini juga dianggap relevan, mengingat besarnya ketergantungan Turki terhadap arus modal dalam bentuk portofolio. Hal ini membuat CAD Turki kerap melebar ketika mata uang yang kuat, seperti Dolar AS, mengalami penguatan dan memicu *sudden reversal*. Tahun politik menjadi penentu atas arah kebijakan terhadap inflasi dan CAD ke depan bagi Turki.

Sektor Keuangan Indonesia Relatif Baik

Jauh berbeda dengan Turki, sektor keuangan Indonesia masih baik. Per

tanggal 5 Juni 2018, Rupiah mencapai Rp13.887/USD. Secara rata-rata, Rupiah sudah mencapai Rp13.717/USD. Dari sisi kebijakan sektor keuangan, terdapat dua hal yang membuat Indonesia berbeda dari Turki.

Pertama, dari segi respons kebijakan moneter. Adanya keterangan pers bersama antara Bank Indonesia, pemerintah, dan Lembaga Penjamin Simpanan pada 28 Mei 2018, serta kenaikan 7-Day (Reverse) Repo Rate atau 7DRR pada 30 Mei 2018 sebesar 25 bps ke tingkat 4,75 persen dinilai cukup menenangkan pelaku pasar.

Keputusan Bank Indonesia meningkatkan suku bunga ini dinilai sangat antisipatif, atau *ahead of the curve*, karena dilakukan sebelum suku bunga acuan AS dan data inflasi domestik diumumkan. Setelah komunikasi dan *actual* kebijakan diimplementasikan, Rupiah menjadi membaik dari level psikologisnya pada Rp14.000/USD di bulan sebelumnya.

Kedua, dari segi fundamental sektor eksternal Indonesia. Salah satu bantalan keseimbangan sektor eksternal suatu negara dapat dilihat dari posisinya terhadap *rest of the world*, yaitu CAD dan cadangan devisa. CAD Indonesia di kuartal pertama 2018 tercatat jauh lebih sempit dari Turki, yaitu 2,15 persen per PDB. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2018 tercatat sebesar USD124,86 miliar, atau sangat aman. Hal ini setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Beberapa indikator sektor keuangan lainnya juga mengalami perbaikan, seperti IHSG yang sedikit *rebound* menuju 6.074 atau menguat secara *day to day* sebesar 0,98 persen. Namun, tantangan masih terjadi pada pasar pendanaan jangka pendek, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan.

Pada lelang 5 Juni 2018, *yield* SPN 3 bulan mengalami peningkatan mencapai 5,30 persen, naik 10 basis poin dari lelang sebelumnya. Kenaikan *yield* mulai terlihat sejak lelang pada April 2018 diiringi dengan penawaran masuk yang berkurang. Tingginya *yield* SPN 3 bulan dan rendahnya penawaran yang masuk disebabkan oleh turunnya permintaan pemodal asing. Hal ini seiring dengan tingginya *yield* SBN AS, menguatnya indeks Dolar AS, serta perilaku pemodal lokal yang cenderung hati-hati dalam menyikapi tingginya volatilitas di pasar keuangan.

Dengan pasar pendanaan yang mengalami tantangan, Pemerintah Indonesia terus menekankan bahwa pihaknya akan menjaga APBN agar tidak menjadi bagian dari ketidakpastian tersebut. Caranya dengan terus menjaga defisit fiskal yang sehat.

Stabilitas Ekonomi Domestik Terjaga

Di tengah gejolak yang terjadi di sektor keuangan, stabilitas ekonomi domestik cukup terjaga. Hal ini, salah satunya, tercermin dari stabilitas harga yang cukup baik pada Mei 2018. Tingkat inflasi pada Mei 2018 sebesar 0,21 persen secara *month to month* atau 3,23 persen secara *year on year*. Inflasi Mei 2018 ini dipengaruhi diantaranya oleh faktor permintaan serta penawaran.

Setelah sejak awal 2018 stabil di kisaran 2,7 persen, faktor permintaan yang tercermin dari komponen inti inflasi sedikit meningkat seiring mulai meningkatnya harga komoditas global dan volatilitas Rupiah. Sedangkan komponen harga yang diatur Pemerintah mengalami tren menurun sejak Juli 2017. Hal ini seiring dengan tidak adanya kebijakan harga energi. Dari sisi penawaran, melimpahnya holtikultura dan panen raya padi membantu menurunkan harga-harga.



Frederico Gil Sander
Lead Economist
World Bank*

Laju inflasi menjelang Lebaran mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Pada bulan Mei 2018, inflasi secara historis lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi bulan Ramadan selama empat tahun terakhir sebesar 0,63 persen. Penurunan yang didukung oleh terkendalinya komponen harga bahan makanan bergejolak (*volatile food*), perbaikan distribusi dan terjaganya pasokan kebutuhan, serta pengawasan distribusi oleh Satgas Pangan mengantisipasi terjadinya praktik permainan harga dan penimbunan barang.

Dengan terjaganya inflasi, serta pengaturan harga oleh pemerintah, terutama BBM, diharapkan agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Hal terakhir tersebut penting, mengingat masih meningkatnya tren harga minyak internasional. Per 5 Juni 2018 harga minyak Brent mencapai USD74,79 per barel atau meningkat 11,93 persen secara *year to date*.

Selain harga-harga domestik, stabilitas fiskal secara umum terjaga. Per April 2018, defisit APBN mencapai 0,37 persen terhadap PDB, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,53 persen.

Outlook Ke Depan

Di tengah ketidakpastian sektor keuangan global, Indonesia perlu terus melakukan kebijakan yang antisipasif dan responsif terhadap perkembangan yang ada. Dengan adanya pengalaman serupa di tahun 2013 dimana terjadi *taper tantrum*, Indonesia saat ini memiliki bantalan perekonomian yang lebih memadai.

Selain itu, kerangka komunikasi dan koordinasi dalam implementasi bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan semakin baik. Hal ini akan memperkuat kemampuan para pengambil kebijakan dalam menangani potensi gejolak ke depan.

Memasuki tahun politik, reformasi harus tetap dijalankan. Contohnya adalah dengan terus meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil. Hal ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Mengkonfirmasi masih positifnya prospek Indonesia ke depan, World Bank pada rilis terakhir juga memprediksi bahwa di tahun 2018 PDB Indonesia masih akan tumbuh sebesar 5,2 persen. Selain itu, inflasi terjaga sebesar 3,5 persen, CAD per PDB di 2 persen, serta defisit anggaran akan menurun menuju 2,1 persen per PDB.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global, bantalan diperlukan dalam bentuk kerangka kebijakan ekonomi makro yang kuat. Hal ini terdiri dari beberapa hal. Pertama, kebijakan moneter yang kredibel menjaga ekspektasi inflasi dan tingkat bunga riil (agar tetap positif). Kedua, Bank Indonesia mengakumulasi cadangan devisa dan menandatangani *bilateral swap agreements*. Ketiga, kebijakan makroprudensial dalam memitigasi utang korporasi swasta dari risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Keempat, kebijakan fiskal konservatif yang membatasi kebijakan yang akan mendorong penerbitan surat berharga negara serta tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. Kelima, komitmen penuh pengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Dari sisi perekonomian riil, menghadapi konsumsi yang masih belum meningkat sesuai ekspektasi, diperlukan bauran kebijakan. Saat ini, perlu diperhatikan bahwa terdapat *partial view* atas konsumsi swasta. Di satu sisi, penjualan ritel dan konsumsi swasta tidak lagi memiliki tren yang mirip. Mulai tahun 2016, penjualan ritel terus turun di saat konsumsi swasta meningkat dengan kecepatan yang moderat. Di sisi lain, konsumsi mengalami *shift* yang besar, di antaranya ke sektor jasa, termasuk penyajian makanan diluar rumah.

Selain itu, riset Bank Dunia menemukan bahwa konsumsi dianggap konsisten dengan potensi pertumbuhan PDB yang semakin datar (*flattening*) sejak 2013. Dengan potensi pertumbuhan PDB yang datar, terdapat potensi meningkatnya pertumbuhan PDB dan konsumsi dalam jangka pendek apabila dilakukan stimulus fiskal ataupun moneter. Namun, terdapat pula risiko, seperti risiko inflasi dan CAD yang meningkat. Sementara dalam jangka panjang, potensi pertumbuhan PDB bisa naik, seiring dengan dilaksanakannya reformasi struktural.

Terdapat dua implikasi dari kondisi tersebut. Pertama, Indonesia perlu melanjutkan untuk menghindari kebijakan jangka pendek yang dapat men-*trigger* inflasi dan CAD. Kedua, Indonesia perlu fokus kepada kebijakan yang meng-*address* masalah produksi pada perekonomian, seperti meningkatkan aset infrastruktur, sumber daya manusia, dan produktivitas.

*Disampaikan pada peluncuran Indonesia Economic Quarterly Kuartal I 2018

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal



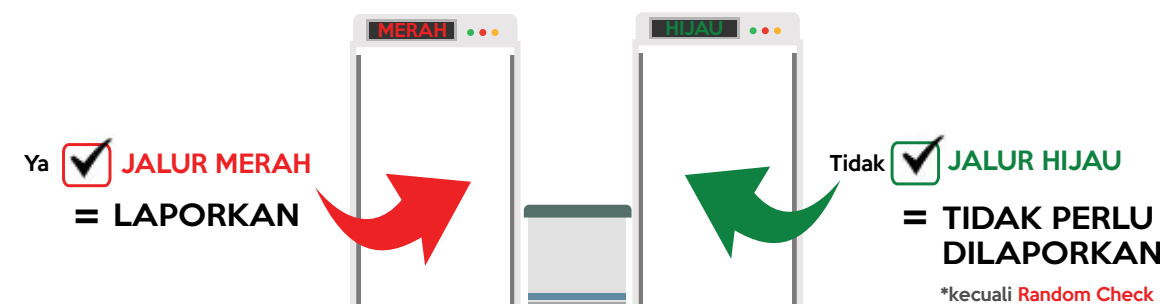
1 Isilah Customs Declaration (CD) dengan lengkap dan benar

10. Saya membawa:
- a Hewan, ikan dan tumbuhan (termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan)
 - b Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi
 - c Uang dan/atau instrument pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih
 - d 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya dan/atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (untuk Awak Sarana Pengangkut)
 - e Barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri untuk keperluan pribadi dengan nilai melebihi USD 50.00 per orang (untuk Awak Sarana Pengangkut) atau USD 500.00 per orang (untuk Penumpang)
 - f Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/institusi/industri)

Ya	Tidak

Perhatian Khusus

2 Serahkan Customs Declaration (CD) ke petugas Bea Cukai



KB, KITE, dan Kontribusinya bagi Perekonomian Nasional

Anda Nugroho,
Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal *)

Lebih dari 45 tahun sudah, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Data terakhir menunjukkan, insentif yang diberikan mencapai Rp72,3 triliun pada 2016. Insentif tersebut diberikan melalui pembebasan dan penangguhan berbagai jenis pajak yang seharusnya disetor kepada pemerintah.

Meskipun insentif dalam bentuk *tax foregone* tersebut nilainya sangat besar, hingga saat ini belum ada yang tahu manfaat pasti yang diperoleh dari KB dan KITE bagi perekonomian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, apakah insentif yang diberikan berhasil membawa dampak positif bagi perekonomian, atau sebaliknya, hanya dinikmati

segelintir pengusaha?

Berangkat dari latar belakang tersebut Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus pengukuran kontribusi ekonomi KB dan KITE.

Latar belakang

Sejarah KB dan KITE dapat ditelusuri pada awal 1970-an. Masa tersebut dikenal sebagai awal periode *oil boom* Indonesia. Produksi yang mencapai puncak serta kenaikan harga minyak bumi pada periode tersebut mendatangkan pendapatan luar biasa besar bagi Indonesia. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa ketergantungan perekonomian terhadap bumi tidak akan *sustainable* di masa yang akan datang.

Untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang tinggi pada minyak bumi, pemerintah mulai gencar

memperbaiki iklim investasi dan melakukan deregulasi. Salah satu upayanya diwujudkan melalui pembentukan KB dan KITE. Kedua kawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan sektor manufaktur, terutama yang berbasis ekspor.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pembentukan *special economic zone* seperti KB dan KITE dapat membawa dampak positif bagi perekonomian. Dampak positif tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak statis (*static benefit*) dan dampak dinamis (*dynamic benefit*).

Dampak statis menangkap efek jangka pendek dari adanya *special economic zone* terhadap perekonomian jangka pendek. Diantaranya, yaitu pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi asing (FDI), penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan ekspor.

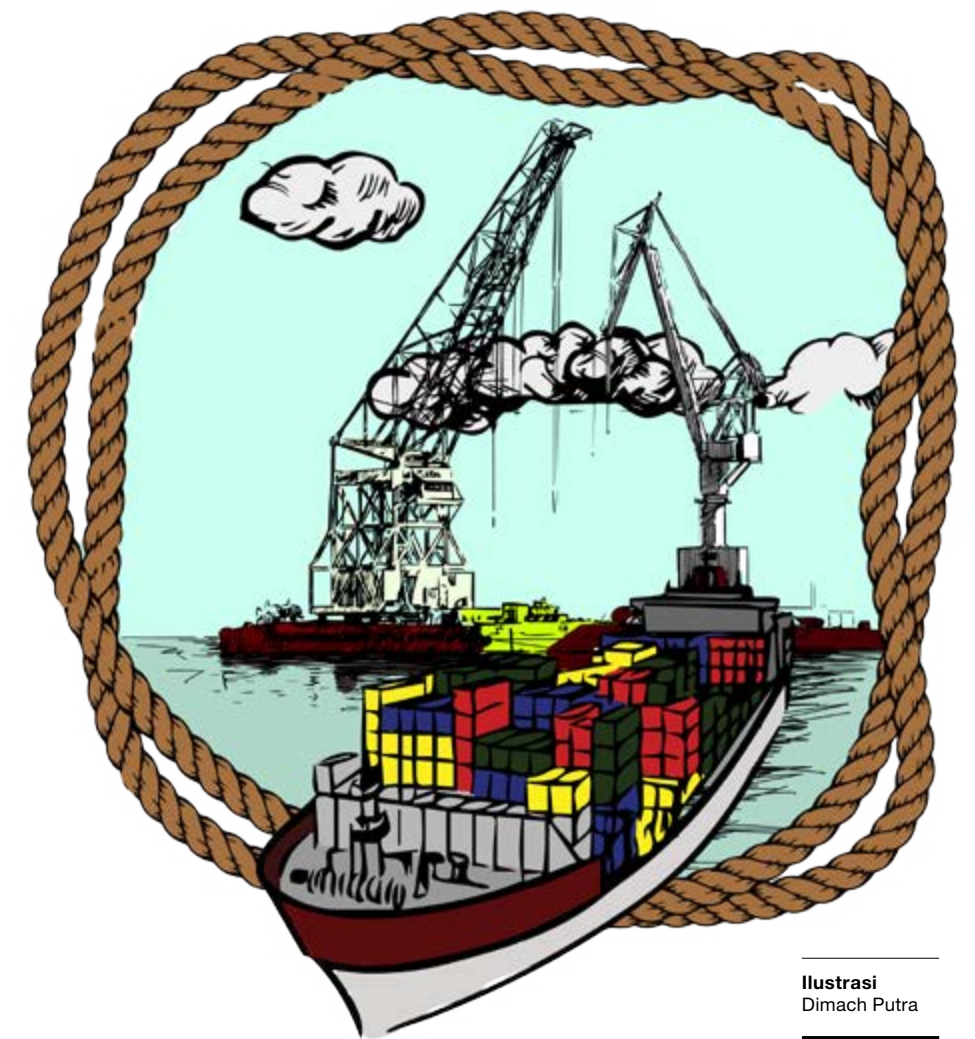
Dampak dinamis menangkap efek jangka panjang dari adanya *special economic zone* terhadap

perekonomian, terutama terkait dengan peningkatan produktifitas. Dampak dinamis dari adanya *special economic zone*, antara lain adanya transfer teknologi, *upgrade* skill tenaga kerja lokal, diversifikasi ekspor, peningkatan efisiensi produksi, serta integrasi dengan *Global Value Chain* (GVC).

Hasil Sensus Pengukuran Kontribusi Ekonomi KB dan KITE

Berdasarkan hasil sensus terhadap perusahaan di KB dan KITE diketahui bahwa total *value added* perusahaan di KB dan KITE pada 2016 mencapai Rp445,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan PDB nominal 2016 sebesar Rp12.406,8 triliun, maka perusahaan di KB dan KITE mempunyai kontribusi sebesar 3,59 persen terhadap perekonomian nasional.

Lebih spesifik lagi, apabila dibandingkan dengan PDB sektor industri pengolahan (non migas), maka kontribusi perusahaan di KB dan KITE mencapai 19,7 persen.



Ilustrasi
Dimach Putra

Ini artinya, hampir seperlima nilai tambah sektor manufaktur nasional disumbang oleh perusahaan di KB dan KITE. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi perusahaan terhadap perekonomian, terutama sektor manufaktur.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perusahaan di KB dan KITE menyerap lebih dari 2,1 juta orang tenaga kerja. Angka tersebut setara dengan 1,8 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional, atau 13,5 persen tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Kontribusi tenaga kerja yang lebih rendah daripada kontribusi perekonomian menunjukkan

bahwa perusahaan di dalam KB dan KITE mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan di luar kawasan.

Pada level yang lebih mikro, satu perusahaan di KB dan KITE rata-rata menyerap tenaga kerja sebanyak 1.250 orang. Penyerapan tenaga terbesar disumbang oleh sektor yang sifatnya padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki. Bahkan, salah satu perusahaan tekstil terbesar di KB dan KITE dapat menyerap hingga 53.000 orang tenaga kerja.

Perusahaan di KB dan KITE juga mempunyai peran penting dalam mendorong ekspor nasional. Total ekspor perusahaan di KB dan KITE mencapai USD54,8 miliar, atau setara dengan 37,8 persen dari total ekspor barang nasional. Nilai ekspor terbesar disumbang oleh pengolahan CPO, tekstil dan alas kaki, serta kendaraan bermotor.

Apabila dibandingkan dengan impor yang dilakukan sebesar USD18 miliar, maka rasio ekspor dibanding

impor perusahaan di KB dan KITE mencapai 3 kali lipat. Dengan demikian, selain mendorong ekspor, perusahaan di KB dan KITE juga turut menyumbang pendapatan devisa yang sangat besar bagi negara.

Pemerintah pusat dan daerah juga mendapat dampak positif dengan adanya perusahaan di KB dan KITE. Pajak yang diterima oleh pemerintah pusat mencapai Rp65 triliun. Nilai ini diluar berbagai pajak dibebaskan dan ditanggihkan sebesar Rp72,3 triliun. Adapun pemerintah daerah juga turut mendapat penerimaan sebesar Rp6,9 triliun dari berbagai berbagai pajak dan retribusi.

Sensus yang dilakukan ini, baru mencakup perhitungan kontribusi ekonomi langsung oleh perusahaan di KB dan KITE. Apabila memperhitungkan kontribusi tidak langsung, maka nilainya akan menjadi jauh lebih besar. Sebab, banyak perusahaan di luar KB dan KITE yang berperan sebagai pemasok bahan baku bagi perusahaan dalam kawasan, begitu pula sebaliknya.

Terkait dengan insentif yang diberikan di KB dan KITE, sebanyak 98,7 persen perusahaan menyatakan bahwa insentif yang diberikan bermanfaat bagi perusahaan. Manfaat yang diperoleh antara lain membantu *cash flow* perusahaan serta meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kondisi tersebut meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional. Dari hasil sensus tersebut, hanya 1,3 persen atau 18 perusahaan yang menjawab bahwa fasilitas yang diberikan tidak bermanfaat.

Hambatan

Adapun hambatan utama yang dirasakan oleh perusahaan antara

lain terkait dengan ketentuan larangan terbatas (lartas) impor untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan mahalnya upah buruh. Untuk barang yang masuk kategori lartas, maka proses pengurusan perizinan akan menjadi lebih sulit dan lama. Terkait dengan itu, pada 1 Februari 2017 pemerintah telah menetapkan pengurangan jenis barang impor yang masuk dalam lartas, dari 48,3 persen menjadi 20,8 persen dari total kode HS (uraian barang) di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Selain itu, mahalnya upah buruh di sekitaran Jabodetabek juga turut menjadi hambatan bagi para pengusaha di KB dan KITE. Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) atau /UMK Jabodetabek dan sekitarnya berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp3,6 juta. Pengusaha mengeluhkan, saat ini UMP/UMK sudah jadi komoditas politik, sehingga kenaikannya menjadi sulit dikendalikan.

Untuk mengatasi hal tersebut pengusaha mulai menggeser usahanya ke luar Jabodetabek. Kawasan yang sedang naik daun untuk pembentukan KB dan KITE baru antara lain Brebes, Tegal, Subang, Boyolali, dan Pasuruan. Selain upah buruhnya murah, daerah-daerah tersebut mempunyai iklim investasi yang ramah bagi calon investor. Pertimbangan lainnya, yaitu hampir terhubungnya jalan tol Trans-Jawa yang membuat distribusi barang semakin lancar.

Manfaat sensus

Informasi yang diperoleh dari sensus ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi dunia usaha, dan pemerintah. Sementara itu, bagi

dunia usaha ataupun *stakeholders* terkait, sensus ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap mereka.

Pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah yaitu bahwa instrumen perpajakan tidak semata berfungsi sebagai pundi-pundi penerimaan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai insentif untuk menggerakkan dunia usaha. Dengan demikian, pemerintah sangat berkepentingan dalam mendorong perkembangan dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Bagi pemerintah, hasil sensus ini tentu saja bisa menjadi bahan masukan untuk mendesain insentif yang lebih menarik bagi calon investor. Tentu saja hal ini harus dibarengi dengan perbaikan di berbagai sektor lain, seperti kemudahan birokrasi, perbaikan infrastruktur, pemeliharaan stabilitas politik, serta berbagai kemudahan lain yang dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri.

Terakhir, meskipun secara umum sensus ini hasilnya positif, pemerintah harus berjuang ekstra keras untuk menarik calon investor ke dalam negeri. Faktanya, dalam satu dekade terakhir, jumlah perusahaan yang berinvestasi di KB dan KITE stagnan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Selain itu, negara-negara tetangga kita juga berlomba-lomba menawarkan insentif yang lebih menarik kepada calon investor agar bersedia menanamkan investasi di negaranya.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Menuju ASIAN GAMES 2018

Jakarta - Palembang, 18 Agustus - 2 September 2018





Yodha bersama keluarga.

Foto dok. pribadi.

Inovasi Tiada Henti

bu pertiwi patut berbangga, pada anak bangsa yang tak lelah berinovasi. Terlebih, pada mereka yang dalam inovasinya tersemat harapan luhur, berdaya dan mampu memberdayakan.

Adalah Muhammad Senoyodha Brennaf, salah satu *awardee* dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dengan inovasinya tidak hanya memberdayakan, tetapi juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Yodha, demikian dia disapa, adalah lulusan Manchester of University di United Kingdom pada 2016 silam. Di tengah pendidikan magisternya, Yodha yang mengambil bidang Advanced Computer Science and IT Management, mendirikan PT. Astrajingga Inovasi Digital, sebuah perusahaan *start-up* yang pada saat itu menggarap dua buah aplikasi, Halal Local dan Monicca.

Belakangan, kedua aplikasi ini berhasil memenangkan kompetisi bergengsi HiTECH Startup Competition

2016 di Britania Raya. Tidak main-main, hadiah yang ditawarkan senilai 50 ribu poundsterling, serta dana investasi senilai 5 juta poundsterling atau setara 90 miliar rupiah lebih.

Aplikasi andal

Perjalanan Yodha dalam mendirikan Astrajingga memang menarik. Bermodalkan dana 5 ribu dolar, Yodha merealisasikan idenya untuk menggarap dua buah aplikasi bersama dengan rekannya. Dana sebesar itu, diperoleh Yodha dengan melakukan penawaran kepada rekan-rekannya sendiri untuk berinvestasi.

“Waktu itu saya menawarkan lewat *facebook* kepada teman-teman. (Saya sampaikan) bahwa saya membutuhkan 5.000 dolar untuk memulai (proyek). Alhamdulillah 5.000 dolar didapat dari 5 orang investor. Dari situlah perjalanan PT. Astrajingga Inovasi Digital dimulai,” kenangnya.

Monicca, salah satu aplikasi yang dikembangkan Yodha, merupakan aplikasi *robo-advisor* sebagai penasihat keuangan digital dan otomatis yang didukung oleh sistem kecerdasan buatan (AI). Melalui Monicca, pengguna diberikan saran finansial dan literasi otomatis yang memudahkan, guna mencapai target finansial. Menurut Yodha, aplikasi ini diperuntukkan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang belum memahami dengan baik pengelolaan keuangan.

Sementara itu aplikasi lainnya, yaitu Halal Local, merupakan *marketplace* produk wisata halal. Aplikasi ini mempermudah muslim *travelers* dalam mendapatkan informasi halal. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mengetahui lokasi restoran yang menyediakan makanan halal, hotel, *homestay*, hingga tempat ibadah (masjid) yang lokasinya dekat dengan pengguna.



lppd
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lppd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Capaian gemilang

Kabar mengenai ajang HiSTAR Startup Competition 2016 diperoleh Yodha dari kampus pada Juni 2016. “Kami pun mempersiapkan dengan baik data pendaftaran yang dibutuhkan, hingga mengikuti seleksinya sampai akhir. Adapun *project* yang kami daftarkan ialah Monicca, perencana keuangan digital dalam saku Anda,” kisah pria kelahiran Pekalongan yang juga bisa berbahasa Korea ini.

Dari sekitar 300 *startup* di seluruh dunia, Astrajingga melalui aplikasi Monicca, menjadi satu-satunya peserta Indonesia yang lolos hingga ke tahap final. Dalam masa tunggu pengumuman pemenang, Yodha kembali mengikutsertakan Monicca pada ajang lain. Kali ini yang diadakan Kemkominfo, yaitu Gerakan Nasional 1000 startup Digital. Lagi-lagi, Monicca berhasil memenangkan juara pertama.

Selanjutnya kabar baik yang ditunggu pun tiba. Aplikasi Monicca berhasil memenangkan HiSTAR Startup Competition 2016. “Sepekan setelahnya kami mendapat berita baik bahwa kami menjadi satu dari tujuh juara HiSTAR Startup Competition 2016 yang berhak mendapatkan investasi dan mengikuti *business roadshow* selama 9 hari di China,”kata Yodha.

Melihat kesempatan tersebut, Yodha segera mendaftarkan Halal Local untuk diikutsertakan pada masa *roadshow* tersebut. “Proposal diterima dan akhirnya Halal Local menjadi peserta ke-8 yang mengikuti *business roadshow* ke China,” jelas pria yang menamatkan program sarjana di Inha University ini.

Kini, Astrajingga besutan Yodha, telah menandatangani perjanjian kerjasama bersama dengan China-UK HiTECH Innovation and Entrepreneurship Forum. Astrajingga juga menjalin inisiasi kerjasama dengan Pemerintah di Tiongkok guna pelaksanaan kedua proyek di sana.

Tak salah pilih

Mendalami ilmu teknologi informasi (TI) di University of Manchester, menjadi hal yang disyukuri Yodha saat ini. Pesan dari sang ayah diakui Yodha membantunya dalam menjatuhkan pilihan. Sebab selain TI, bidang bisnis adalah *passion* yang telah lama menarik hatinya .

“Dalam dilema tersebut, ayah saya berpesan, *Lebih baik menjadi orang yang bermata satu di antara orang-orang yang buta, ketimbang menjadi orang yang bermata dua di antara orang-orang yang melihat.*” ujar Yodha mengenang.

Menurut sang ayah, dibanding TI, ilmu bisnis telah banyak yang menguasai. Selain itu, dunia TI masih terbilang baru dan berkembang cukup pesat belakangan, bahkan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, bidang TI linear dengan *background* pendidikan Yodha semasa sarjana. Beruntung, kombinasi antara keahlian di bidang TI dan *passion* di bidang bisnis, mengantarkan Yodha menjadi seorang *digital entrepreneur* sukses seperti sekarang.

Melalui keahliannya, Yodha ingin memperbanyak proyek di bidang riset. Dia berharap, hasil karyanya bisa bermanfaat sehingga meningkatkan kualitas hidup orang banyak. “Saya berharap lewat perusahaan digital yang kami bangun dapat turut membantu secara aktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Indonesia, memajukan bangsanya, serta menjadi kebanggaan di kancah internasional,”harap Yodha.

LPDP di hati

Salah satu hal yang membuat Yodha menyukai LPDP dibanding penyedia

beasiswa lain adalah adanya Program Keberangkatan (PK). “LPDP merupakan beasiswa terbaik. Tidak hanya memberikan dana beasiswa, tapi juga membangun kapasitas diri lewat program PK,”akunya. Selain itu menurutnya, adanya pilihan program pendidikan yang beragam, baik di dalam maupun di luar negeri, hingga pendampingan pasca studi dan *alumni network*, menjadikan LPDP memiliki nilai lebih.

Perjuangan Yodha dalam memperoleh beasiswa LPDP diakuinya merupakan persiapan terbaik. Sebelum seleksi, Yodha sudah mengantongi sejumlah informasi yang diperlukan, tips tembus beasiswa, hingga melakukan latihan wawancara dan Forum Group Discussion. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya saat berjuang memperoleh beasiswa sarjana di Inha University 2009 lalu. Saat itu, Yodha baru berhasil mengantongi beasiswa penuh ke Korea Selatan pada percobaan yang kesembilan.

Dalam poses seleksi, LPDP mengedepankan kontribusi yang bisa diberikan calon *awardee* selepas menyelesaikan pendidikan, begitupun dengan Yodha. “Alhamdulillah saat saya kuliah sarjana di Korea, saya banyak memberi pelatihan kewirausahaan pada para buruh migran (TKI) di sana, agar tidak terus kerja di luar negeri dan bisa kembali ke Indonesia (lalu) membangun usaha, sehingga dekat dengan keluarga. Sumbangsih itulah yang mereka (LPDP) harapkan akan dilakukan kembali pada episode kehidupan kali ini, “kenangnya.

Di akhir perbincangan Yodha sempat berpesan, “Anda akan menemukan bagaimana LPDP sangat men-*support* para putra-putri terbaik bangsa untuk berkarya untuk negeri. Maka, jangan lupa untuk memberi sumbangsih kepada Indonesia sepuluhang dari tanah air”.

Teks Farida Rosadi

Perekonomian Nasional di Tahun Politik

Teks Sunawan Agung Saksono,
Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

Tahun 2018 ini adalah tahun politik di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak akan diselenggarakan di berbagai daerah. Namun, apakah penyelenggaraannya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia?

Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009

Saat pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dilaksanakan, kondisi perekonomian Indonesia belum pulih dari krisis global. Ekspor mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,7 persen. Akibatnya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 4,5 persen. Kinerja investasi juga hanya tumbuh 2,77 persen.

Komponen yang menyokong pertumbuhan adalah konsumsi domestik. Kuatnya konsumsi merupakan imbas rendahnya inflasi yang tercermin dari indeks harga konsumen sebesar 2,78 persen. Faktor pendorong lain adalah penurunan harga bahan bakar minyak, lancarnya program konversi minyak tanah ke LPG, dan meratanya distribusi bahan kebutuhan pokok.

Pelaksanaan Pemilu mendorong pertumbuhan konsumsi sebesar 5,95 persen pada triwulan I tahun 2009. Selain didukung realisasi belanja K/L pada umumnya, Komisi Pemilihan Umum merealisasikan belanja sebesar Rp10,4 triliun. Peningkatan konsumsi juga

disebabkan belanja Partai Politik (Parpol) dan calon anggota legislatif dalam pelaksanaan kampanye.

Pilkada 2013

Pilkada juga terjadi di 152 daerah pada tahun 2013. Perekonomian Indonesia pada tahun tersebut tumbuh 5,6 persen dengan ekspor tumbuh 4,2 persen. Capaian tersebut tergolong rendah karena turunnya harga-harga komoditas di pasar internasional dan rendahnya permintaan terutama dari China.

Investasi hanya tumbuh 5,3 persen. Perlambatan pada sektor investasi non bangunan terjadi karena para investor telah berinvestasi cukup besar tahun sebelumnya, sehingga cenderung mengurangi belanja investasi.

Kenaikan suku bunga turut mempengaruhi. Bank Indonesia menaikkan BI rate yang mengerek tingkat suku bunga kredit dan suku bunga lainnya. Kenaikan tersebut merupakan respons Bank Indonesia terhadap inflasi yang mencapai 8,4 persen. Tingginya inflasi tersebut didorong oleh tingginya harga bahan bakar minyak sehingga nilai tukar rupiah melemah.

Konsumsi menjadi penopang pertumbuhan sehingga tetap berada pada level yang baik. Pertumbuhan konsumsi cukup tinggi yaitu 5,4 persen untuk konsumsi rumah tangga dan 6,9 persen untuk konsumsi pemerintah. Hal

ini didorong oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam golongan kelas menengah serta perbaikan penghasilan masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada turut memberi andil. Pemerintah merealisasikan belanja sebesar Rp400 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Belanja yang lebih besar lagi dilakukan oleh Parpol dan para kontestan pilkada. Kondisi tersebut mendorong peningkatan konsumsi terutama pada semester II tahun 2013.

Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014

Tahun 2014 adalah tahun politik yang semarak. Pada tahun tersebut secara umum perekonomian Indonesia tumbuh stabil. Namun, ekspor hanya tumbuh sebesar 1 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Investasi juga tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 4,1 persen.

Tingkat suku bunga yang tinggi sebagai kelanjutan kebijakan pengetatan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi kurang optimalnya investasi. Kenaikan BI rate sebagai respon terhadap tingginya inflasi tercermin dari indeks harga konsumen yang bertahan pada angka 8,3 persen. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi penyumbang tingginya tingkat inflasi.

Di tengah menurunnya indikator-indikator perekonomian, secara

mengejutkan konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi. Bahkan untuk konsumsi lembaga non profit rumah tangga tumbuh sangat tinggi yaitu sebesar 12,4 persen. Tingginya konsumsi tersebut antara lain didorong oleh kegiatan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, realisasi pengeluaran pemerintah melalui KPU kurang lebih Rp10 triliun. Sementara, dana kampanye Parpol tercatat sebesar Rp3,1 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk pengeluaran-pengeluaran lain yang dilakukan oleh Parpol, calon anggota dewan legislatif dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pemilu.

Prospek Perekonomian 2018-2019

Bercermin dari tahun-tahun politik sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu sedikit banyak memang mampu menyumbang

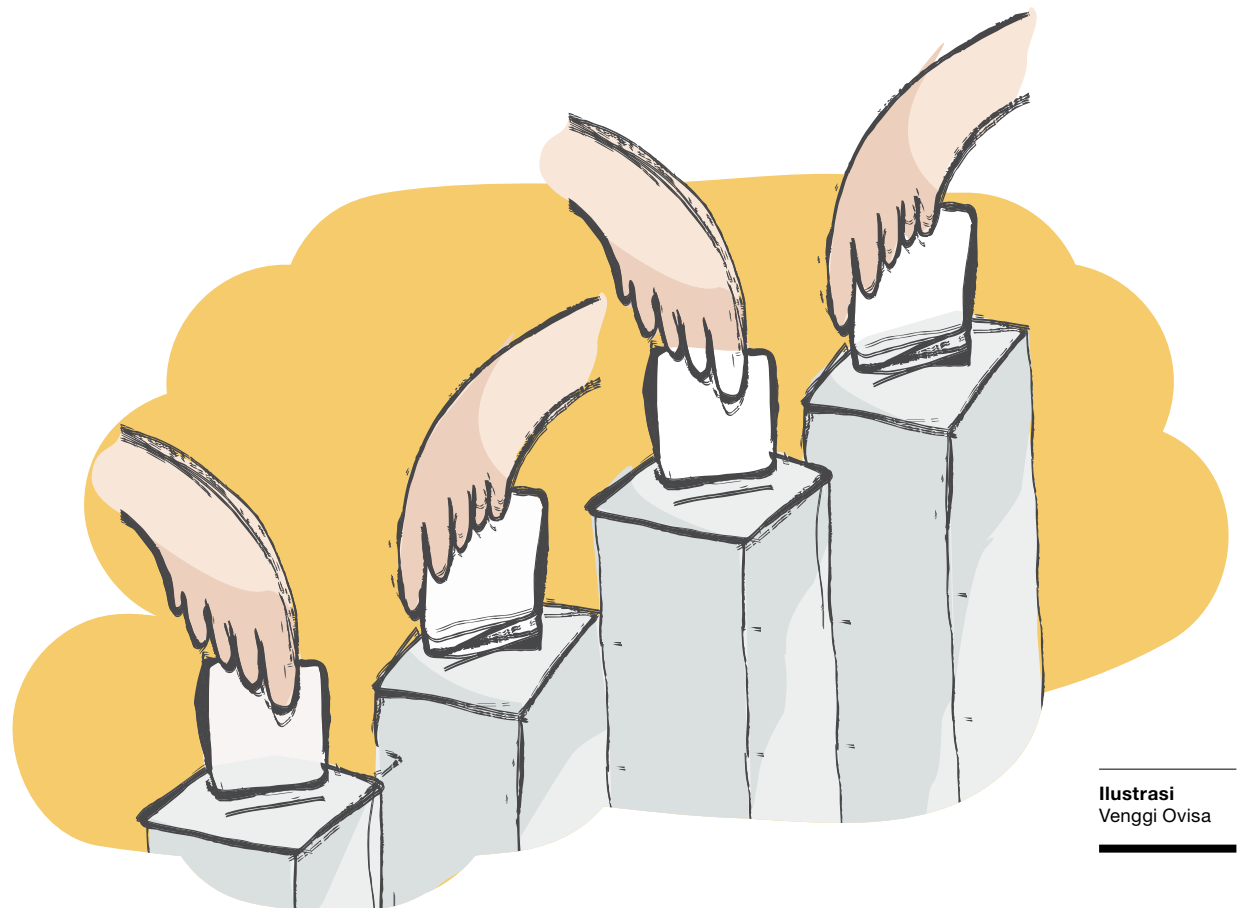
pertumbuhan. Namun, kondisi eksternal dan dampak kebijakan pemerintah merupakan hal dominan yang mempengaruhi kondisi perekonomian secara umum.

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia cukup baik. Meski terdapat risiko terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat serta perlambatan perekonomian China, namun hal tersebut akan terkompensasi dengan membaiknya perekonomian negara-negara di dunia secara umum.

Di sisi kebijakan, pemerintah senantiasa mendorong pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta perbaikan kesejahteraan sosial. Hal tersebut tercermin antara lain dari peringkat infrastruktur Indonesia pada Global Competitiveness Index 2017-2018 yang menduduki posisi 52 dari 137 negara.

Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan investasi dan konsumsi. Hal tersebut terindikasi dari pertumbuhan investasi yang mencapai 7,1 persen pada kuartal 3 tahun 2017 serta angka pengangguran terbuka yang mencapai 5,50 persen pada bulan Agustus 2017 (lebih kecil dari angka pengangguran tahun 2016 sebesar 5,61 persen).

Berkaca pada kondisi perekonomian global yang semakin membaik, maka perekonomian Indonesia juga dipercaya akan relatif stabil pada 2018 dan 2019. Untuk itu, Pemerintah harus menjamin situasi yang kondusif sehingga masyarakat tetap percaya diri dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, dalam situasi hiruk pikuk politik apapun negara tetap hadir untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera.



Ilustrasi
Venggi Ovisa

Pemerintah Naikkan Insentif Pajak PMV Menjadi Rp50 miliar

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah

Ilustrasi
Dimach Putra

P erkembangan perekonomian digital di Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Dengan kemajuan teknologi dan penggunaan telepon genggam yang semakin meningkat, usaha bisnis digital semakin meningkat. Dengan prospek yang sangat bagus ini, perusahaan besar pun tidak ragu-ragu melakukan investasi pada *marketplace* di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia memiliki potensi pasar dan potensi pengusaha yang sangat besar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025, pemerintah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Visi ini terdapat di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang menargetkan terciptanya 1.000 *technopreneur* dengan valuasi bisnis sebesar USD10 miliar dan nilai *e-commerce* mencapai USD130 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan meluncurkan Gerakan Nasional 1000 *Start-up* (usaha pemula) Digital di tahun 2016.

Untuk mendorong pencapaian visi tumbuhnya 1.000 *start-up* digital, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap e-Commerce*) 2017-2019 (Peta Jalan SPNBE 2017-2019). Dari dua puluh enam program Peta Jalan SPNBE 2017-2019, salah satu programnya adalah melakukan penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan butir kegiatan memberikan insentif pajak bagi investor perdagangan *e-commerce*, khususnya bagi Perusahaan Modal Ventura (PMV). Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018 tanggal 11 Mei 2018 (PMK Nomor 48/2018), kebijakan insentif pajak bagi PMV yang melakukan investasi bagi *start-up* secara resmi dapat dilakukan.

Pembiayaan melalui PMV memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembiayaan melalui perbankan atau lembaga

keuangan lainnya. Sebagai usaha baru, banyak *start-up* menghadapi kendala permodalan, tetapi belum bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena belum cukup *bankable* untuk dapat memperoleh kredit perbankan. PMV bisa mengatasi hambatan ini dengan memberikan akses modal kepada perusahaan *start-up*. Selain mendapatkan fasilitas pembiayaan, keunggulan lain dari PMV adalah adanya pendampingan supaya bisnis dari Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dapat berhasil.

Ambang batas naik

Sebagai tindak lanjut atas peta jalan SPNBE 2017-2019 dan ketentuan batasan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, batasan omset PPU yang menjadi partner usaha PMV dinaikkan menjadi maksimal Rp50 miliar dalam setahun. Hal ini ditegaskan di dalam PMK Nomor 48/2018.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 PMK Nomor 48/2018, batasan penjualan bersih tersebut merupakan penghasilan bersih tahun pajak sebelum PMV melakukan penyertaan modal kepada UMKM. Kedua, insentif diberikan kepada PPU selama belum menjual saham di bursa efek atau dalam jangka waktu maksimal 10 tahun.

Ketiga, PMV tersebut harus sudah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha *start-up* dapat memanfaatkan suntikan modal dari PMV yang pada Desember 2017 berjumlah 67 PMV yang terdaftar di OJK dengan nilai total aset sebesar Rp11,52 triliun.

Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 48/2018, penghasilan yang diterima atau diperoleh PMV berupa bagian laba dari PPU (perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang belum menjual saham di bursa efek atau untuk jangka tidak melebihi 10 tahun), bukan merupakan objek pajak penghasilan. Konsekuensi dari aturan ini bahwa pengecualian pajak dimaksud hanya untuk laba PPU, tidak termasuk adanya *capital gain*. Oleh karena itu, penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh PMV dari penyertaan modal pada PPU yang telah menjual sahamnya di efek atau setelah melewati jangka waktu 10 tahun tetap merupakan objek PPh. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebagai persyaratan administratif dan untuk mempermudah pemeriksaan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan wajib dibukukan secara terpisah.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengatur insentif PMV yang berinvestasi pada perusahaan mikro kecil menengah dengan persyaratan tertentu berupa pengecualian sebagai objek pajak atas bagian laba PMV dari PPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Sebagai aturan pelaksana dari ketentuan ini, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura (PMK Nomor 250/1995). Dalam aturan yang diterbitkan 23 tahun lalu tersebut, hal yang menjadi batasan usaha kecil dan menengah bagi perusahaan pasangan usaha, yaitu penjualan bersih

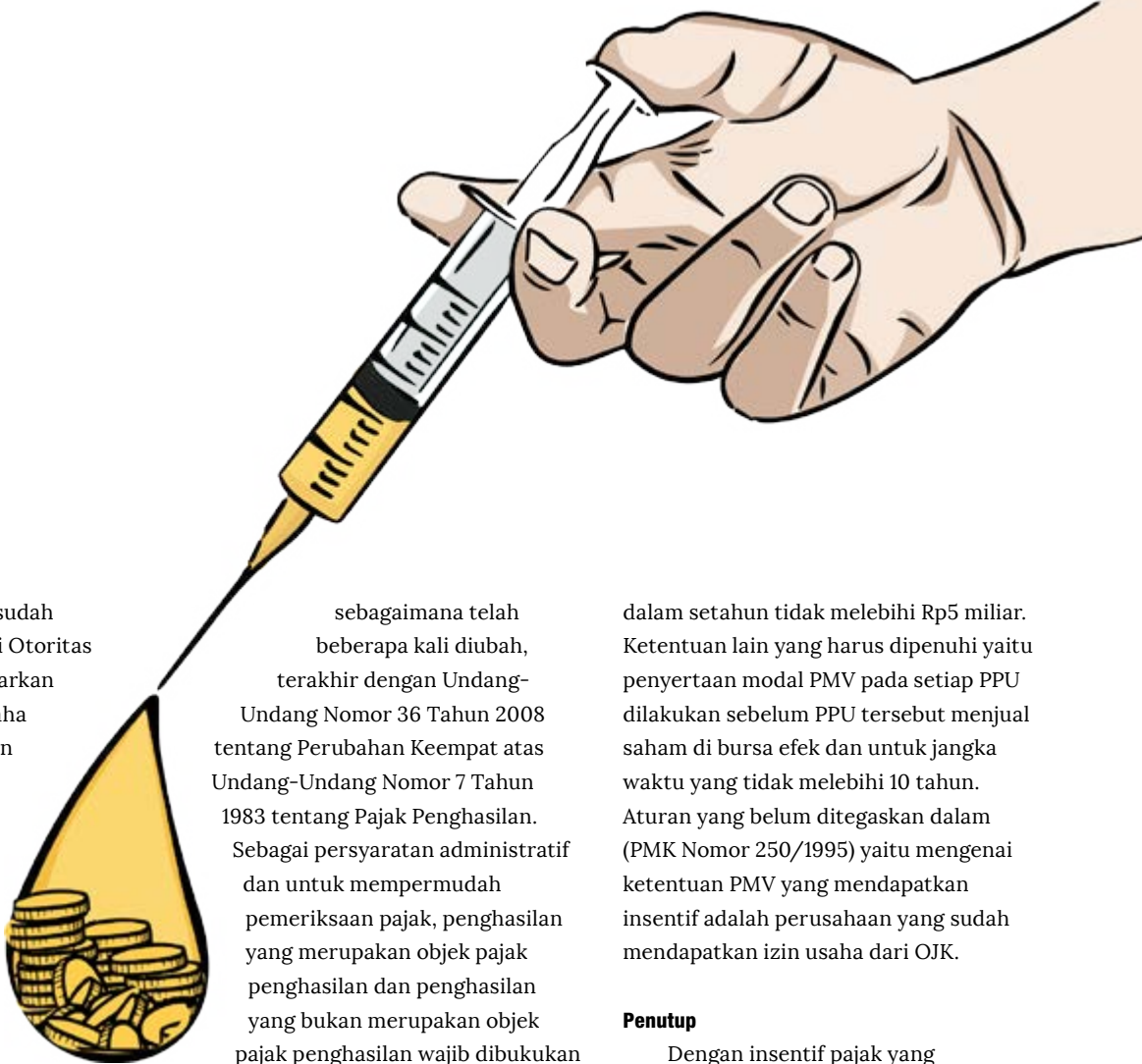
dalam setahun tidak melebihi Rp5 miliar. Ketentuan lain yang harus dipenuhi yaitu penyertaan modal PMV pada setiap PPU dilakukan sebelum PPU tersebut menjual saham di bursa efek dan untuk jangka waktu yang tidak melebihi 10 tahun. Aturan yang belum ditegaskan dalam (PMK Nomor 250/1995) yaitu mengenai ketentuan PMV yang mendapatkan insentif adalah perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK.

Penutup

Dengan insentif pajak yang diberikan, diharapkan dukungan pembiayaan dari modal ventura pada UMKM mitra akan semakin luas. Waktu 10 tahun yang diberikan untuk mendapatkan insentif pajak dirasakan cukup untuk memberikan waktu bagi *start-up* untuk naik kelas menjadi pengusaha yang lebih besar, sehingga tidak memerlukan insentif dari pemerintah.

Selain ketentuan pemberian insentif pajak, pelaksanaan peta jalan SPNBE 2017-2019 perlu untuk dipantau dan dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Teks Budi Sulistyo



Merengkuh Asa Kaum Pasar

“Saat belajar di kampus, saya merasa ada yang kurang. Ilmu (ekonomi) yang saya pelajari berasal dari Barat tapi ada beberapa konteks yang tidak bisa diaplikasikan saat berbicara mengenai kemasyarakatan di Indonesia,” ujar Pusoko Nur Seto, saat ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu. Seto, panggilan akrabnya, merupakan salah satu penggiat Sekolah Pasar, sebuah gerakan menghidupkan kembali geliat pasar tradisional di tengah pesatnya pusat perbelanjaan ritel modern.

Pada tahun 2011, Seto yang kala itu berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) akhirnya ‘mengembara’ bersama temannya untuk mencari referensi ekonomi. Hingga akhirnya bertemu dengan salah seorang senior yang menjadi peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UGM. Kemudian Seto pun bergabung di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. “Kita tidak lagi belajar masalah teoritis, tapi bagaimana teori itu bermanfaat bagi masyarakat,” jelas peraih Tiga Besar Proposal Riset Marketing Terbaik pada “Nielsen Marketing Research Competition 2010” oleh AC Nielsen ini.

Kemudian, pria kelahiran Yogyakarta, 19 Juli 1989 ini pun membuat suatu *project* bersama rekan-rekannya bernama Sekolah Pasar. Kegiatan ini merupakan pemberdayaan bagi pedagang, pemasok, pengecer, dan konsumen di pasar tradisional. Seperti namanya, Sekolah Pasar



Seto dan pedagang Pasar Kranggan Yogyakarta

Seto menumbuhkan industri kecil

Foto dok. pribadi

benar-benar merupakan wadah menuntut ilmu bagi para pelaku pasar tradisional agar tidak tergerus pasar modern. “Kami menyadari bahwa ketika hanya memberikan modal tanpa pendidikan dan pelatihan, maka bantuan itu akan cepat hilang,” tambahnya.

Sekolah Pasar yang pertama kali diselenggarakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta ini menuai sukses. Kisah perjalanan kegiatan ini juga telah dibukukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dengan judul “Sekolah Pasar Rakyat: Dari Pasar Rakyat Meraih Kedaulatan.” Seto kala itu juga memanfaatkan media sosial Twitter untuk publikasi kegiatan Sekolah Pasar.

Tak disangka, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan kala itu juga menaruh perhatian terhadap kegiatan ini. Gita Wirjawan menawarkan untuk mengkloning konsep ide Sekolah Pasar ke 20 pasar percontohan di Indonesia. Karena keterbatasan sumber daya,

Seto bersama rekan-rekannya hanya bisa menyanggupi untuk menerapkan ide ini di dua pasar, yaitu di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Klaten. Bahkan Joko Widodo semasa menjabat Walikota Solo juga turut mendukung aksi ini demi mengembalikan kejayaan pasar tradisional di tengah masyarakat. Begitu juga Anies Baswedan yang pernah mengajar di kelas pemberdayaan Sekolah Pasar.

Memilih mejadi birokrat

Pada tahun 2014, Seto terpilih menjadi salah satu perwakilan dalam konferensi organisasi Global Ecovillage Network di Malaysia. Global Ecovillage Network merupakan jaringan yang mengembangkan komunitas-komunitas lintas negara dan budaya untuk kehidupan masyarakat dunia yang berkelanjutan. Kesempatan emas ini sayangnya harus Seto tinggalkan karena bersamaan dengan tes akhir seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan.



Setelah resmi menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan, Seto mendapat penugasan di Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. Seto menyadari, keberadaannya di institusi pembuat kebijakan negara tak seperti saat ia menjadi masih menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, Seto bebas mengkritisi siapa saja. Kini Seto justru menghadapi tantangan yang menarik. “Kalau dulu kami mengkritisi dari luar, sekarang dengan peran saya sebagai aparatur sipil negara justru tantangannya adalah memperbaiki

dari dalam,” terangnya. Kelebihannya, Seto bisa menerjemahkan paradigma dan ekspektasi pihak luar ke dalam bahasa birokrasi.

Setelah sekian lama menggeluti ekonomi kerakyatan, Seto berupaya membawa visi masyarakat bawah ke pemerintah. Pernah suatu kali terdapat pembahasan mengenai asuransi pertanian di BKF. Salah satu rekan Seto bercerita bahwa terdapat kendala komunikasi antara pemerintah dengan petani. Sebelumnya, Pegawai Berprestasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Tahun 2017 ini pernah bergerak dalam kegiatan pendampingan petani. Maka Seto cukup memahami bagaimana dinamika para petani di bawah.

Bersyukur Seto memiliki beberapa jaringan dengan para petani, ia pun memberikan masukan dalam *focus group discussion* (FGD). Supaya hasil FGD tersebut tidak bersifat subjektif memihak pemerintah semata, informasi mengenai jaringan petani tersebut diberikan supaya tidak luput dari proses pengambilan kebijakan. Informasi itu memberi banyak masukan mengenai skema asuransi pertanian, besaran asuransi, dan tanggapan petani terhadap kebijakan ini.

Saat berkecimpung dalam *project* Sekolah Pasar, Seto bersama rekan-rekannya menemukan banyak ide untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui program DesaMart, yakni sebuah etalase yang menjual produk-produk lokal. Akhirnya dibentuklah DesaMart pertama di Jalan Kaliurang Yogyakarta.

Program ini bertujuan menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat dan menekan urbanisasi masyarakat desa ke kota. “Kalau desa mampu memberikan lapangan

pekerjaan, maka masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang layak,” jelas Seto. Program ini pun terpilih menjadi Finalis dalam “Gadjah Mada Social Entrepreneurship Challenge 2011” yang digelar Universitas Gadjah Mada. Bahkan saat itu Luhut Binsar Panjaitan (saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) pun menggulirkan dana *corporate social responsibility* melalui DesaMart.

Penikmat literatur sejarah

Di tengah anak muda yang lebih senang menonton film atau berinteraksi dengan gadget dan media sosial, Seto justru merasakan kenikmatan saat tenggelam dalam buku “Indonesia Menggugat” karya Soekarno dan “Indonesia Merdeka” karya Mohammad Hatta. Dua sosok itu mengajarkan pada Seto bahwa kemapanan pribadi itu tidak akan ada artinya apabila tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Mulailah membaca karya-karya tulis pendiri bangsa ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, atau Tan Malaka,” pesan Seto kepada para generasi muda, khususnya generasi millennial di Kementerian Keuangan. “Bacalah karya-karya mereka dengan hati, tanpa tendensi kepopuleran. Dengan begitu nanti kita akan mendapatkan arah apakah saat ini kita telah berada di *track* yang benar. Kedua, perbanyak melatih kepekaan sosial dengan lebih sering melihat ke bawah (masyarakat yang kurang beruntung),” tutupnya sembari tersenyum.

Teks Pradany hayyu

Hobi dan Obsesi

Foto
Anas Nur
Huda



Selepas menghadiri undangan rapat, saya mendapati dua orang perempuan sedang berlari sore di halaman kompleks perkantoran Kementerian Keuangan. Olahraga lari memang sedang *booming* dan menjadi gaya hidup masyarakat. Berbagai perlombaan digelar, mulai dari yang bersifat kompetisi sampai sekadar hiburan. Komunitas lari pun banyak bermunculan, termasuk di Kementerian Keuangan.

Lari pada hakikatnya merupakan olahraga murah. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kaki, kita semua bisa melakukan olahraga ini. Namun, saat menjadi hobi, olahraga lari bisa jadi tidak murah lagi. Terlebih, bila dilengkapi dengan sejumlah aksesoris pendukung semisal sepatu, jam, kaos, celana, dan topi.

Bagi saya, menggeluti hobi adalah sesuatu yang sah-sah saja, bahkan perlu didukung. Hal ini mengingatkan saya dengan cerita yang ditulis seorang kawan pada laman *facebook*-nya. Cerita ini mengenai dua orang laki-laki dengan

masing-masing hobinya. Saking bagusanya, menurut saya, cerita ini saya simpan di arsip surat elektronik saya.

Tersebutlah dua orang kawan lelaki berstatus menikah yang sama-sama dalam perantauan. Untuk membunuh sepi, kedua lelaki ini menghabiskan waktunya dengan menekuni hobi *play station*. Sang istri kawan pertama merasa baik-baik saja dengan hobi suaminya. Tak ada alasan yang membuat dia keberatan, hanya saja dia berpesan agar suaminya menjaga kondisi badan dan disiplin waktu.

Sang istri kawan kedua, keberatan dengan hobi suaminya. Berbagai alasan selalu dilontarkan untuk menghentikan sang suami dari hobinya. Mulai dari hobi tersebut tak berguna, kebiasaan begadang karena hobi, pengaruh hobi bagi buruknya kesehatan, dan sebagainya.

Tahun berganti. Hobi *play station* sepertinya sudah terlalu membosankan. Kedua lelaki tersebut kemudian berganti hobi. Kali ini mereka menggilai mobil *remote control*, lengkap dengan peralatan perakitan, perbengkelan, dan

perlombaannya. Buat hobi ini, istri kawan pertama menyatakan baik-baik saja saja. Istri dari kawan kedua, lagi-lagi *ngedumel*. Bahkan melarang keras sang suami bermain mobil *remote control*.

Tahun demi tahun berlalu, kedua sahabat tadi telah berpisah karena alasan kedinasan mengharuskan mereka pindah tugas. Rupanya kawan pertama, kini memiliki hobi baru. Tak tanggung-tanggung, hobinya mengutak-atik, *touring*, bahkan ikut lomba dengan mobil *off road*-nya. Ketika *touring* dan lomba, istrinya menjadi navigator. Sementara kawan kedua, entah sekarang menekuni hobi apa. Namun yang pasti, istrinya bukan lagi yang dulu mendampinginya.

Lewat kisah ini, kita jadi tahu, bahwa hobi menjadi salah satu cara bagi kebanyakan orang untuk menyalurkan obsesinya. Melarang menekuni hobi, bisa mengakibatkan penyaluran obsesi, yang boleh jadi ke tempat yang tak dikehendaki.

Jadi, bagaimana dengan Anda?

Teks Riza Almanfaluthi



Jika bunga-bunga di dunia bisa berbicara, mereka akan menyatakan kecemburuannya pada bangsa ang-grek. Tidak ada bunga lain yang dapat membuat manusia lebih tergila-gila.

Foto
Anas Nur
Huda

Raras Prayangung, seorang perempuan cerdas dan mandiri, berhasil mengembalikan kejayaan perusahaan jamu dan kosmetik turun-temurun keluarganya bernama Kemara. Sesaat sebelum sang eyang putri yang juga pencetus perusahaan, Janirah, meninggal dunia, Raras ditugaskan Janirah untuk mencari bunga yang selama ini belum pernah ditemukan, Puspa Karsa. Janirah yang dulu kala bekerja sebagai abdi dalem keraton Yogyakarta percaya bahwa Puspa Karsa yang tidak ada di museum dan buku sejarah adalah bunga yang nyata ada di dunia. Puspa Karsa bukanlah hanya ada dalam sebuah cerita pengantar tidur layaknya Timun Mas dan Malin Kundang. Janirah percaya bahwa Puspa Karsa

AROMA KARSA

adalah bunga agung yang memiliki kekuatan melebihi segala sihir dan kesaktian yang selama ini sengaja disembunyikan dari rekam sejarah.

Dari sudut Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, sebuah keramaian terjadi karena seorang pemuda yang dijuluki hidung tikus, Jati Wesi, ditangkap polisi. Pemuda pencinta aroma-aroma bunga yang ahli meniru racikan parfum kenamaan tersebut terbukti meniru, memproduksi, dan menjual parfum tiruan dari perusahaan Kemara. Alih-alih memenjarakan, Raras si pemilik Kemara “menghukum” Jati Wesi dengan kontrak bekerja seumur hidup dengan perusahaan Kemara. Raras meyakini bahwa Jati Wesi adalah sosok yang tepat yang selama ini ia cari untuk membantunya menemukan Puspa Karsa.

Berhasilkah Raras dan Jati menemukan Puspa Karsa?

Dewi lestari simangunsong yang dikenal dengan nama pena Dee Lestari pada Maret 2018 menerbitkan sebuah novel berjudul “Aroma Karsa.” Setelah puas menjelajah “Supernova” dan “Kopi nusantara”, kali ini Dee menuliskan petualangan barunya yang unik, yakni mengenai indra penciuman yang tajam dan aroma-aroma. Dalam Aroma Karsa, Dee mengajak pembaca untuk mengikuti petualangan seru menemukan bunga sakti Puspa Karsa di pedalaman hutan. Dee berhasil mengombinasikan dunia nyata yang modern dan dunia gaib yang membuat kita sebagai pembaca benar-benar percaya keberadaan dan kedahsyatan Puspa Karsa.

Kelebihan utama dari Dee yang jarang dimiliki penulis lokal lain ialah riset yang dalam serta kemampuannya mengolah riset tersebut ke dalam cerita yang informatif namun tidak menggurui. Ditambah lagi bumbu romansa yang mampu membuat pembaca hanyut dalam kisah 700 halaman ini. Dengan kekuatan cerita petualangan, misteri, mitologi, keluarga, persahabatan, dan percintaan yang dihadirkan Dee, saya yakin Aroma Karsa dapat memberikan aroma baru dalam imaji anda.

Selamat Membaca. Selamat menikmati setiap aroma dalam hidup anda.

Peresensi: Adik Tejo Waskito

Sepat yang “Sepet” Khas Sumbawa



Bagi yang pernah berkunjung ke Pulau Sumbawa pasti pernah merasakan kenikmatan sepat, makanan khas Sumbawa. Sepat ini bukan sejenis ikan air tawar yang biasa kita kenal. Sepat Sumbawa merupakan makanan berkuah yang berbahan dasar ikan dan sayur-sayuran. Penggunaan bumbu yang beragam, membuat sepat kaya akan citarasa. Sumbawa merupakan pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Letaknya tepat berada di sebelah timur Pulau Lombok. Selama puluhan tahun Sumbawa terkenal sebagai penghasil madu dan susu kuda liar.

Secara geografis, Sumbawa sangat beruntung karena dikelilingi oleh pesisir pantai. Tidak hanya indah, pantai dan laut Sumbawa kaya akan hasil laut. Tak heran, olahan ikan menjadi makanan utama bagi penduduk setempat. Sepat adalah salah satunya. Saya beruntung mendapat kesempatan untuk mencicipi sepat langsung di sebuah warung di Sumbawa Barat. Letak warung persis berada di pesisir pantai sehingga suasananya sangat nyaman untuk beristirahat sejenak. Hembusan angin laut yang sejuk dan pemandangan garis pantai yang biru membawa kedamaian saat saya memasuki

warung sederhana itu. Apalagi ditambah dengan sambutan pemilik warung yang hangat. Sepat termasuk jenis masakan yang sehat karena dimasak tanpa minyak atau digoreng. Bahan masakan ini terdiri dari beragam jenis sayuran, kuah asam, dan ikan laut segar. Umumnya, ikan yang digunakan adalah jenis kakap merah, kerapu, bandeng, menggali, sira, atau baronang. Tetapi ada juga yang mencampurnya dengan udang atau ayam. Untuk sayuran, biasanya menggunakan tomat, terong ungu, dan daun kemangi. Sementara bumbu pelengkapya terdiri dari cabai, bawang

Menu Plecing kangkung dan sepat.

Suasana Pesisir Pantai Sumbawa

Suasana Tempat Makan

merah, garam, terasi dan kemiri. Rasa asam pada kuahnya dihasilkan dari perpaduan asam jawa, belimbing wuluh, mangga muda, serta air jeruk limau. Proses pembuatan sepat terbilang cukup mudah. Pertama, kemangi disiangi dan diambil daunnya saja. Setelah dicuci bersih, kemangi dibakar atau dipanggang bersama dengan sayuran dan bumbu pelengkap lainnya. Secara bersamaan, juru masak juga menyiapkan ikan atau udang bakar. Sementara menunggu sayuran dan ikan matang, ia kemudian menumbuk kasar bumbu merah untuk campuran kuah. Tak seberapa lama menunggu, aroma sepat memenuhi warung dan menggoda indra penciuman. Tanpa sadar, air liur saya terbit dengan sendirinya. Selera makan saya semakin bertambah ketika melihat cara penyajian sepat dalam kondisi perut benar-benar lapar. Sayuran yang sudah dibakar diiris tipis-tipis dan dimasukkan ke dalam mangkuk saji bersama suwiran ikan

bakar. Setelah itu, kuah asam yang masih mendidih turut dituangkan. Terakhir, kita bisa menambahkan sambal dan perasan jeruk limau sesuai selera. Cara orang Sumbawa menikmati sepat berbeda dengan cara makan sop. Kuah sepat tidak digenangi di atas nasi. Menurut pemilik warung, orang Sumbawa menyendok nasi secara terpisah, baru kemudian menyeruput kuah sepat. Cita rasanya yang asam, segar, hangat dan pedas mengigit berpadu dengan sempurna dalam indera pengecapan saya. Saat pertama menghirup kuah sepat, saya mengecap sensasi rasa yang ‘sepel’. Mungkin dari rasa ‘sepel’ itulah asal usul nama sepat ini berasal. Tetapi apabila memakannya dengan mencampurkan ikan bakar dan nasi hangat, lidah akan segera terbiasa dan malah membuat ketagihan. Selain sepat, di warung ini terdapat menu plecing kangkung masakan khas Pulau Lombok. Plecing kangkung adalah olahan kangkung rebus yang disajikan

dengan sambal tomat dan perasan jeruk limau. Untuk mengimbangi rasa pedas dan hangat dari sepat, saya juga memesan kelapa muda yang sangat menyegarkan. Lebih dari cukup untuk untuk menambah energi saat kelelahan di siang hari yang panas ini. Warung yang menjual masakan sepat sangat mudah ditemui di sekeliling pulau. Harganya juga relatif terjangkau. Cukup dengan Rp30ribu-50ribu saya sudah bisa makan kenyang dan puas. Bagi penduduk setempat, sepat populer disantap pada bulan Ramadan. Hampir setiap keluarga menyiapkannya sebagai menu pembuka puasa. Bagi saya sendiri, mencicipi sepat semakin menambah rasa cinta pada ragam olahan kuliner nusantara. Dalam hati saya berjanji, jika ada umur panjang, saya pasti akan kembali ke Sumbawa.

Teks dan foto Resha Aditya Pratama



Selebriti

Foto
Dok. Pribadi

Sekar Sari

Menapaki Jalan Seni

Film Festival 2014, Honorable Feature Mention dalam 19th Toronto Reel Asian International Film Festival tahun 2015, serta sebagai Best Actress pada acara Usmar Ismail tahun 2016.

Suka bereksplorasi

Sekar suka bereksplorasi pada banyak hal, ia tidak ingin meletakkan dirinya pada kotak tertentu. Menurut Sekar, luasnya bidang eksplorasi bisa memberikan proses yang beragam dan menarik untuk diselami. Salah satunya ia berhasil mendapatkan beasiswa di Choreomundus mengambil *International Master in Dance Knowledge Practice and Heritage*. Dalam beasiswa ini, ia belajar metode pengarsipan seni tari, dan ia pernah bekerja dalam sebuah project penelitian pengarsipan audio visual bernama Recording the Future. Selain itu di Choreomundus juga belajar tentang keterkaitan seni tari dengan beragam topik ataupun metodologi keilmuan yang lain, misal politik, ekonomi, sosial, antropologi, dan lain sebagainya.

Seni peran dapat menunjukkan keberagaman identitas manusia Indonesia melalui berbagai cerita yang dibangun dengan konstruksi sosial, politik, ekonomi, serta budaya tertentu pula. Tokoh-tokoh maupun kisah-kisah ini bisa dijadikan sebuah refleksi serta inspirasi bagi masyarakat, pun sebagai proses berfikir itu sendiri.

Menurut Sekar, orang yang berkecimpung di segala bidang seni dan siapapun yang menjadi bagian dari warga Indonesia, selayaknya perlu mengetahui dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak. “Misalnya pajak hadiah sewaktu mendapatkan penghargaan atas karya seni yang telah dibuatnya. Sekar juga mendukung agar sistem perpajakan yang sudah disusun sedemikian rupa dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi negara beserta seluruh masyarakat,” pesannya.

Teks Abdul Aziz

Menurutnya, seni adalah sesuatu yang ‘fluid’, cair, beririsan, dan beradu satu sama lain. Salah satu bidang seni yang paling ditekuninya adalah seni peran dan seni tari. Berkat kerja kerasnya, ia ditawarkan menjadi pemeran utama dalam sebuah film pendek berjudul *Seterang Bulan* yang juga menjadi film pertamanya pada tahun 2010. Selanjutnya, ia juga lolos dalam seleksi pemain utama film *Siti* pada tahun 2014.

Meski tak tayang di bioskop nasional, namun film ‘Siti’ berhasil memboyong banyak penghargaan di luar negeri. Di antaranya adalah Best Performance for Silver Screen Award di Singapore International

“Sekar Sari, wanita asal Yogyakarta yang mengaku jatuh cinta dengan seni mengatakan bahwa seni merupakan medium untuk mengolah dan mengungkapkan rasa, ide, gagasan, catatan peristiwa, zaman ataupun kritikan.”

Sekar kecil selalu menyukai seni. Seiring berjalannya waktu, ia mulai sadar bahwa seni memiliki cakupan yang sangat luas. Atas motivasi tersebut, pada tahun 2007, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Ia berpandangan bahwa konstruksi identitas bangsa berasal dari seni budayanya.

Mas Praim

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi



**MEMPERINGATI
HARI ANAK NASIONAL
23 JULI 2018**



Foto
Resha Aditya Pratama



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**